

# KAJIAN EKONOMI REGIONAL

## PROVINSI MALUKU

TRIWULAN I – 2010



**BANK INDONESIA**

**Kelompok Kajian Statistik dan Survei**

BANK INDONESIA AMBON

### Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan sistem keuangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan

### Visi Bank Indonesia

Menjadi Bank Sentral yang dapat kredibel secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil

### Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan

Kami sangat mengharapkan komentar, saran dan kritik demi perbaikan buku ini.

#### **Alamat Redaksi :**

Kelompok Kajian, Statistik dan Survei

Kantor Bank Indonesia Ambon

Jl. Raya Pattimura No. 7

AMBON, 97124

Telp. : 0911-352762-63 ext. 1012

Fax. : 0911-356517

E-mail : edy\_kristianto@bi.go.id

victor\_ab@bi.go.id

Homepage : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



---

## KATA PENGANTAR

Buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku, yang disusun secara rutin triwulanan merupakan salah satu sasaran strategis Kantor Bank Indonesia Ambon, yaitu: mengoptimalkan hasil kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk (i) memberikan masukan bagi perumusan kebijakan di kantor pusat, dan (ii) memberikan masukan mengenai perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran regional di Provinsi Maluku kepada pihak terkait (*stakeholders*) di daerah secara rutin setiap triwulan.

Buku ini menyajikan perkembangan ekonomi regional khususnya perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Perkembangan tersebut disajikan dalam bentuk yang ringkas dan diusahakan menggunakan data terkini yang dapat diperoleh. Penambahan kajian yang lebih mendalam pada sumber pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi semoga dapat dimanfaatkan berbagai pihak dalam mengambil kebijakan dan perencanaan pelaksanaan program.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari seluruh perbankan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik, responden survei, civitas akademika dan berbagai pihak terutama masyarakat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Ambon. Dalam meningkatkan kualitas buku ini, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kualitas buku sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini dan semoga Tuhan memberikan berkah-Nya kepada kita semua dalam mengupayakan kinerja yang lebih baik.

Ambon, Mei 2010  
BANK INDONESIA AMBON

ttd

Totok Hermiyanto  
Pemimpin



---

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Grafik .....	v
Ringkasan Eksekutif .....	viii
Bab I Perkembangan Ekonomi Daerah.....	1
1.1.    Kondisi Umum .....	1
1.2.    Permintaan Daerah.....	2
1.2.1. Konsumsi .....	2
1.2.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	4
1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Regional Bruto (PMTB)/Investasi.....	5
1.2.4. Ekspor dan Impor .....	5
1.3.    Penawaran Daerah .....	6
1.3.1. Sektor Pertanian.....	7
1.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian .....	8
1.3.3. Sektor Industri Pengolahan .....	9
1.3.4. Sektor Listrik Gas dan Air Bersih (LGA) .....	9
1.3.5. Sektor Bangunan.....	10
1.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) .....	11
1.3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi .....	12
1.3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan .....	12
1.3.9. Sektor Jasa .....	13
<i>Boks 1. Upaya Percepatan Kegiatan Investasi di Maluku Melalui Pemberian Insentif &amp; Kemudahan</i>	
<i>Boks 2. Sail Banda 2010 – Small Islands For Our Future Ajang Promosi Produk Unggulan &amp; Pariwisata Maluku</i>	
Bab II Inflasi.....	19
2.1.    Gambaran Umum.....	19
1.1    Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas .....	20
Bab III Perkembangan Perbankan Regional .....	27
3.1.    Perkembangan Kinerja Perbankan .....	27
3.2.    Penghimpunan Dana Masyarakat/Dana Pihak Ketiga .....	29



---

3.3. Penyaluran Kredit Perbankan .....	31
3.3.1. Penyaluran Kredit Perbankan di Maluku .....	31
3.3.2. Penyaluran Kredit UMKM/Kredit Menurut Skala Usaha .....	35
3.3.3. <i>Non Performing Loans</i> (NPLs) Bank.....	36
<i>Boks 3. Momentum Peningkatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maluku Melalui Relaksasi dan Penambahan Bank Penyalur KUR</i>	
Bab IV Sistem Pembayaran.....	41
4.1. Pembayaran Tunai.....	41
4.1.1. <i>Inflow</i> (Uang Masuk) .....	42
4.1.2. <i>Outflow</i> (Uang Keluar).....	42
4.1.3. PTTB (Pemberian Tanda Tidak Berharga).....	43
4.1.4. Pembayaran Non Tunai.....	43
4.1.5. Kegiatan Kliring.....	43
4.1.6. Transaksi BI RTGS ( <i>Real Time Gross Settlement</i> ) .....	44
Bab V Perkembangan Keuangan Daerah .....	45
5.1. Realisasi APBN di Provinsi Maluku .....	45
<i>Boks 4. Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Daerah Dalam Permodalan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil di Maluku</i>	
Bab VI Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat .....	49
6.1. Ketenagakerjaan .....	49
6.2. Tingkat Kemiskinan .....	52
Bab VII Prospek Perekonomian Daerah .....	55

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Penggunaan Harga Konstan Tahunan (y.o.y) .....	2
Tabel 1.3.1	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektoral Harga Konstan Tahunan (y.o.y) .....	7
Tabel 2.2.1	Inflasi Kelompok Komoditas .....	21
Tabel 2.3.1	Ranking Inflasi Sub kelompok Komoditas Triwulan IV 2009 .....	22
Tabel 2.3.2	Ranking Deflasi Sub kelompok Komoditas Triwulan IV 2009 .....	22
Tabel 2.3.3	Perkembangan Inflasi Kelompok Bahan Makanan .....	23
Tabel 2.3.4	Pergerakan Harga Rata-rata Bulanan Kelompok Komoditas Bahan Makanan .....	24
Tabel 2.3.5	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau .....	24
Tabel 2.3.6	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar .....	24
Tabel 2.3.7	Perkembangan Inflasi Kelompok Sandang .....	25
Tabel 2.3.8	Perkembangan Inflasi Kelompok Kesehatan .....	25
Tabel 2.3.9	Perkembangan Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga .....	25
Tabel 2.3.10	Perkembangan Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan .....	26
Tabel 5.1.1	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran tahun 2010 yang dibiayai dari APBN .....	45
Tabel 6.1.1	Tabel Ketenagakerjaan 2006-2009 .....	52
Tabel 6.1.2	Tabel Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama .....	53
Tabel 6.1.3	Tabel Status Pekerjaan Menurut Wilayah Tempat Tinggal .....	53
Tabel 6.1.4	Tabel Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin .....	54
Tabel 6.1.5	Tabel Persentase Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota .....	54
Tabel 6.1.6	Tabel Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama .....	55
Tabel 6.2.1	Tabel Kemiskinan Propinsi Maluku 2006 – 2009 .....	55

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.1	Perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, zona Sulampua dan Maluku .....	1
Grafik 1.2.1.1	Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) .....	3
Grafik 1.2.1.2	Pergerakan Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) .....	3
Grafik 1.2.1.3	Pergerakan Indeks Ekspektasi Konsumen .....	3
Grafik 1.2.1.4	Pendaftaran Kendaraan Baru .....	4
Grafik 1.2.1.5	Realisasi Kredit Konsumsi oleh Perbankan Maluku .....	4
Grafik 1.2.3.1	Penyaluran Kredit Investasi Perbankan di Wilayah Maluku .....	5
Grafik 1.2.4.1	Perkembangan Ekspor Maluku .....	5
Grafik 1.2.4.2	Perkembangan Kegiatan Muat di Pelabuhan Ambon(ton).....	6
Grafik 1.3.1.1	Produksi Ikan Tangkap di PPN Ambon .....	7
Grafik 1.3.1.2	Realisasi Penyaluran Kredit Sektor Pertanian.....	8
Grafik 1.3.5.1	Realisasi pengadaan semen .....	10
Grafik 1.3.5.2	Realisasi Kredit Sektor Konstruksi oleh Perbankan Maluku (Miliar Rp.) .....	10
Grafik 1.3.6.1	Kegiatan Bongkar & Muat Barang di Pelabuhan Ambon .....	11
Grafik 1.3.6.2	Realisasi Kredit Sektor PHR oleh Perbankan Maluku .....	11
Grafik 1.3.7.1	Arus Penumpang di Pelabuhan Ambon (orang).....	12
Grafik 1.3.5.1	Realisasi Kredit Sektor Angkutan dan Komunikasi oleh Perbankan Maluku.....	12
Grafik 1.3.8.1	Perkembangan Indikator Pokok Perbankan Maluku.....	12
Grafik 1.3.9.1	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah .....	13
Grafik 2.1.1	Tren Inflasi Nasional dan Ambon 2005-2010 .....	19
Grafik 2.3.1	Pergerakan Harga Rata-Rata Bulanan Kelompok Komoditas Bahan Makanan .....	23
Grafik 3.1.1	Kinerja Perbankan Maluku .....	27
Grafik 3.1.2	<i>Non Performing Loans</i> Perbankan Maluku .....	27
Grafik 3.1.3	Pertumbuhan <i>Asset</i> Perbankan Maluku .....	28
Grafik 3.1.4	Pertumbuhan DPK dan Kredit Perbankan Maluku Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Bank .....	28
Grafik 3.2.1	Pertumbuhan DPK Perbankan Maluku .....	29
Grafik 3.2.2	Pergerakan suku bunga DPK Bank Pemerintah/Pemda di Maluku.....	29



---

Grafik 3.2.3	Pergerakan suku bunga DPK bank swasta di Maluku.....	29
Grafik 3.2.4	Perkembangan DPK Perbankan Maluku berdasarkan wilayah kerja ..	30
Grafik 3.2.5	Perkembangan DPK Perbankan Maluku per jenis simpanan .....	30
Grafik 3.2.6	DPK Perbankan Maluku per jenis deposito.....	31
Grafik 3.3.1.1	Perkembangan Kredit Perbankan Maluku .....	31
Grafik 3.3.1.2	Penyaluran Kredit Perbankan Maluku .....	32
Grafik 3.3.1.3	Pergerakan Suku Bunga Kredit Investasi.....	32
Grafik 3.3.1.4	Perkembangan Suku Bunga Kredit Konsumsi .....	33
Grafik 3.3.1.5	Perkembangan Suku Bunga Kredit Modal Kerja .....	33
Grafik 3.3.1.6	Perkembangan Realisasi Kredit Baru .....	34
Grafik 3.3.1.7	Perkembangan Kredit per sektor ekonomi .....	34
Grafik 3.3.1.8	Perkembangan Kredit berdasarkan wilayah kerja .....	34
Grafik 3.3.2.1	Perkembangan Kredit Berdasarkan Plafon Kredit .....	35
Grafik 3.3.2.2	Perkembangan KUR.....	36
Grafik 3.3.3.1	Perkembangan NPLs Perbankan Maluku .....	36
Grafik 3.3.3.2	Perkembangan kualitas kredit.....	37
Grafik 3.3.3.2	Perkembangan NPLs berdasarkan jenis penggunaan .....	37
Grafik 4.1.1	Perkembangan perputaran Uang Kartal .....	42
Grafik 4.2.1	Perkembangan Perputaran Kliring Regional (Rp. Miliar) .....	44
Grafik 4.2.2	Perkembangan Transaksi Non Tunai RTGS (Rp.Miliar) .....	44
Grafik 6.1	Perkembangan Indeks Ekspektasi Masyarakat .....	55
Grafik 6.2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Proyeksi 2010 .....	56



*halaman ini sengaja dikosongkan*



# RINGKASAN EKSEKUTIF





---

## PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Tren pemulihan ekonomi global yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan seperti sebelum krisis keuangan dan meningkatnya permintaan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan laporan mampu tumbuh positif. Secara tahunan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Maluku akan tumbuh sebesar 5,34% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009 yang tercatat sebesar 4,70% (y.o.y) Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini searah dengan prospek ekonomi yang telah disampaikan pada Kajian Ekonomi Regional periode sebelumnya..

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2010 didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat sehubungan dengan persiapan *event* internasional *Sail* Banda 2010. Sementara itu, sisi investasi diperkirakan tumbuh positif seiring dengan realisasi proyek pemerintah dan proyek swasta dalam mempersiapkan *Sail* Banda 2010. Pada sisi ekspor terjadi peningkatan seiring dengan peningkatan produksi ikan tangkap sebagai komoditas ekspor utama Maluku, serta beroperasinya industri pertambangan tembaga di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Di sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi kecuali sektor listrik gas dan air. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor angkutan dan komunikasi. Kinerja sektor pertanian terutama didorong oleh meningkatnya produksi ikan tangkap, terkait dengan meningkatnya jumlah armada penangkap ikan, musim panen komoditas hortikultura serta dimulainya panen komoditas tanaman bahan makanan (tabama). Pada sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi pertumbuhan didorong oleh peningkatan jumlah armada transportasi serta pembukaan beberapa rute penerbangan baru yang melayani daerah-daerah di Maluku. Selain itu beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan *Sail* Banda 2010 sebagai sebuah even internasional seperti *launching* dan seminar serta aktifitas koordinasi, komunikasi dan distribusi barang-barang modal diperkirakan juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan pada kedua sektor tersebut.

## PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan (y.o.y) laju kenaikan harga-harga secara umum di Kota Ambon menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan inflasi tercatat 7,08% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,48%. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat



8,84%. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh terjadinya inflasi pada bulan Januari 2010 yang tercatat 3,23% (m.t.m). Posisi inflasi Kota Ambon ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang pada triwulan laporan mencapai 3,43%. Kondisi ini sejalan dengan pola historisnya, dimana harga-harga masih terpengaruh oleh kenaikan pada akhir tahun (yang dipengaruhi perayaan Natal dan Tahun Baru) serta terhambatnya proses distribusi barang-barang pada awal triwulan akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif.

Sumber utama penyebab inflasi pada triwulan laporan dan penyebab terkoreksinya proyeksi inflasi yang telah disampaikan pada periode sebelumnya adalah berasal dari lonjakan indeks harga konsumen di kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok bahan makanan. Peningkatan IHK pada kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan didorong oleh kenaikan pada sub kelompok Angkutan Udara akibat tingginya permintaan/kebutuhan transportasi angkutan ini. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau peningkatan IHK didorong oleh kenaikan pada sub kelompok minuman tidak beralkohol sementara pendorong inflasi pada kelompok bahan makanan berasal dari sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya.

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Dari sisi perbankan, perkembangan perbankan daerah di Maluku pada triwulan I tahun 2010 menunjukkan arah positif. Perkembangan tersebut tercermin dari perkembangan di sisi kelembagaan maupun perkembangan indikator pokok perbankan seperti *Asset*, *outstanding* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit

Pada triwulan laporan terdapat penambahan 3 buah kantor bank umum di wilayah kerja KBI Ambon sehingga total kantor bank di Maluku mencapai 102 buah kantor. Peningkatan tersebut diiringi oleh peningkatan *Asset* yang tumbuh sebesar 15,21% (y.o.y) atau meningkat senilai Rp 923,2 miliar sehingga total *Asset* menjadi Rp 6,99 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,57% (y.o.y) sehingga mencapai Rp5,26 triliun dan penyaluran dana kepada masyarakat (kredit) tumbuh sebesar 33,28% atau secara nominal meningkat Rp830,89 miliar menjadi Rp3,33 triliun.

Pertumbuhan kredit yang cukup agresif tersebut mendorong *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat sehingga pada akhir triwulan I 2010 mencapai 63,29%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2009 yang tercatat 51,09%. Peningkatan LDR tersebut diiringi peningkatan kualitas kredit yang tercermin dari tingkat *Non*



.....  
*Performing Loans* (NPL's) yang relatif rendah. Pada triwulan I tahun 2010 tercatat NPL's sebesar 2,28%, lebih rendah dibandingkan NPL's triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,42%.

Dari sistem pembayaran tunai, pada triwulan laporan *inflow* ke Bank Indonesia Ambon tercatat sebesar Rp294,45 miliar dengan data *outflow* tercatat sebesar Rp24,27 miliar sehingga terjadi *net inflow* sebesar Rp270,18 miliar. Sementara itu dari data sistem pembayaran non tunai, tercatat pertukaran warkat kliring sebesar Rp798 miliar dengan jumlah warkat mencapai sebanyak 34 ribu lembar dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) *incoming* tercatat sebesar Rp3,43 triliun dan *outgoing* sebesar Rp649 miliar sehingga terjadi *net incoming* senilai Rp2,78 triliun.

## PROSPEK PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II tahun 2010 diproyeksikan akan tumbuh positif pada kisaran 5,5%-6,0%. Dari sisi permintaan pertumbuhan masih didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan ekpektasi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini didorong oleh kenaikan penghasilan masyarakat seiring dengan diberlakukannya UMP Provinsi Maluku tahun 2010 yang meningkat 8,4% dibandingkan tahun 2009 serta kondisi panen tabama yang diperkirakan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Disamping itu juga terdapat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan persiapan event berskala internasional *Sail* Banda 2010. Dari sisi investasi diperkirakan akan didorong oleh persiapan penyelenggaraan even internasional *Sail* Banda 2010, realisasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pemekaran serta komitmen investasi dari investor asing dan dalam negeri sebagai tindak lanjut kegiatan Maluku *Investment Day* 2010.

Seiring dengan meningkatnya permintaan dari sisi penawaran, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II 2010 diprakirakan masih berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor pertanian serta sektor industri pengolahan. Pada sektor PHR pertumbuhan terutama didorong oleh telah beroperasinya hotel yang memiliki jaringan internasional di kota Ambon seperti Swissbel Hotel dan Amaris Santika Hotel. Sementara pendorong pertumbuhan pada sektor Angkutan dan komunikasi berasal dari rencana dibukanya rute penerbangan Jakarta-Makassar-Ambon oleh maskapai nasional serta rute penerbangan di dalam provinsi.

Perkembangan harga-harga secara umum pada akhir triwulan II 2009 diprakirakan akan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (q.t.q) dan diproyeksikan secara tahunan pada kisaran 9% ± 1% (y.o.y). Beberapa faktor yang



.....  
diperkirakan menyebabkan capaian inflasi tersebut diantaranya kondisi musim yang memasuki musim hujan, peningkatan permintaan seiring persiapan event *Sail* Banda 2010 serta kondisi pada triwulan II 2009 yang terjadi deflasi sebesar 0,21%(y.o.y). Selain itu terjadinya kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dan rencana kenaikan tariff dasar listrik (TDL) diperkirakan memberikan tekanan terhadap perubahan harga.

Kinerja perbankan daerah diprakirakan akan mengalami peningkatan baik dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Peningkatan ini diperkirakan sejalan dengan komitmen perbankan di Maluku untuk mempromosikan dan menjual produk TabunganKu guna menjaring dana-dana dari kalangan potensial namun selama ini terkendala persyaratan administrasi. Dari sisi penyaluran kredit peningkatan didorong oleh relaksasi ketentuan KUR, penambahan perbankan penyalur KUR, pelonggaran ketentuan dan syarat administrasi (nasabah lama boleh mendapatkan kredit kembali), penurunan suku bunga akan meningkatkan determinasi perbankan dalam menyalurkan kredit.

Pembukaan jaringan kantor baru perbankan daerah dan rencana pembukaan kantor cabang baru beberapa bank swasta nasional mengindikasikan prospek perkembangan Maluku di mata para pelaku ekonomi masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Hal ini terutama didukung masih berkembangnya daerah-daerah baru hasil pemekaran yang terus melakukan akselerasi pembangunan guna mengejar ketertinggalan baik sarana maupun pra-sarana daerahnya dibandingkan daerah-daerah lain yang lain yang lebih maju.



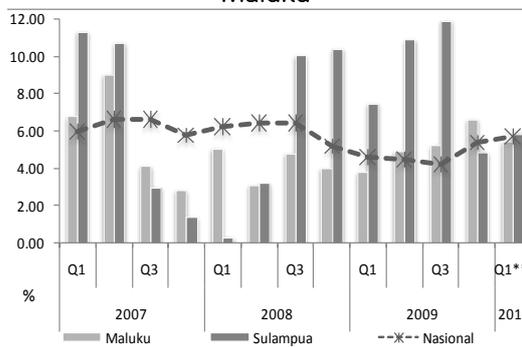
*halaman ini sengaja dikosongkan*

# BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

## 1.1. Kondisi Umum

Tren pemulihan ekonomi global yang mulai menunjukkan tanda-tanda seperti sebelum krisis keuangan terus berlanjut dan meningkatnya permintaan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan laporan tetap tumbuh positif. Secara tahunan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Maluku akan tumbuh sebesar 5,34% (y.o.y), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009 yang tercatat sebesar 4,70% (y.o.y). Secara triwulanan, triwulan I 2010 pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -2,41% (q.t.q), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,1% (q.t.q). Kondisi ini adalah hal yang wajar dan bersifat siklus tahunan mengingat triwulan IV tahun anggaran berjalan merupakan puncak realisasi proyek pemerintah.

**Grafik 1.1.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Zona Sulampua dan Maluku**



Sumber: BPS \*) angka sementara \*\*) prakiraan BI

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan laporan sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah Sulawesi-Maluku dan Papua yang masing-masing sebesar 5,70% dan 5,83% (y.o.y). Hal tersebut disebabkan telah mulai pulihnya sektor industri pengolahan seiring dengan membaiknya permintaan baik dari dalam maupun dari negara-negara tujuan ekspor.

Faktor lain adalah meningkatnya ekspor komoditas perkebunan dan pertambangan seiring dengan pulihnya perekonomian negara-negara mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.

Pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2010 didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat sehubungan dengan persiapan *Sail* Banda 2010. Sementara sisi investasi diperkirakan tumbuh positif seiring dengan realisasi proyek pemerintah dan proyek swasta dalam mempersiapkan *Sail* Banda 2010.

Di sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi kecuali sektor listrik gas dan air. Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor angkutan dan komunikasi. Kinerja sektor pertanian terutama didorong oleh

meningkatnya produksi ikan tangkap, terkait dengan kondisi cuaca yang cukup kondusif, musim panen komoditas hortikultura serta dimulainya panen komoditas tanaman bahan makanan (tabama). Pada sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi pertumbuhan didorong oleh peningkatan jumlah armada transportasi serta pembukaan beberapa rute penerbangan baru yang melayani daerah-daerah di Maluku. Selain itu beberapa rangkaian persiapan pelaksanaan *Sa//Banda* 2010 sebagai sebuah even internasional seperti *launching* dan seminar serta aktifitas koordinasi dan distribusi lain diperkirakan juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan pada kedua sektor tersebut.

## 1.2. Permintaan Daerah

Perekonomian Maluku pada triwulan laporan terutama masih didorong oleh konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 4,85% dan 12,73% (y.o.y) dengan kontribusi 3,64% dan 2,92% terhadap pertumbuhan total 5,34%(y.o.y). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat mencapai 4,63% (y.o.y).

Perkembangan pertumbuhan PDRB Maluku secara tahunan (y.o.y) menurut jenis penggunaan atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 1.2.1. berikut

Tabel 1.2.1  
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Penggunaan Harga Konstan Tahunan (y.o.y)

Komponen Guna	2008				2009				2010
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1*)
Konsumsi	6.51%	5.79%	4.89%	4.77%	4.63%	5.57%	6.14%	6.80%	4.85%
Konsumsi Pemerintah	2.44%	0.89%	-0.88%	0.37%	4.42%	5.08%	7.02%	12.17%	12.73%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.67%	17.47%	10.90%	4.99%	3.96%	4.36%	4.94%	10.73%	4.09%
Perubahan Stok	-31.53%	-37.55%	353.94%	101.37%	26.27%	-16.41%	-48.31%	-84.16%	-85.29%
Ekspor	5.82%	6.63%	4.78%	2.75%	1.66%	2.03%	2.45%	3.61%	5.19%
Impor (-)	6.10%	8.35%	8.80%	6.64%	3.34%	2.65%	2.32%	4.35%	2.84%
<b>Share Terhadap Pertumbuhan</b>									
Konsumsi	4.82%	4.21%	3.64%	3.52%	3.48%	4.16%	4.57%	5.05%	3.64%
Konsumsi Pemerintah	0.57%	0.21%	-0.22%	0.09%	1.02%	1.17%	1.64%	2.91%	2.92%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.64%	0.62%	0.42%	0.20%	0.16%	0.18%	0.20%	0.44%	0.17%
Perubahan Stok	-0.75%	-1.39%	1.84%	0.94%	0.41%	-0.37%	-1.09%	-1.51%	-1.59%
Ekspor	0.81%	0.90%	0.67%	0.38%	0.23%	0.28%	0.34%	0.49%	0.71%
Impor (-)	1.07%	1.43%	1.53%	1.15%	0.59%	0.48%	0.42%	0.78%	0.50%
<b>PDRB</b>	<b>5.03%</b>	<b>3.12%</b>	<b>4.82%</b>	<b>3.98%</b>	<b>4.70%</b>	<b>4.95%</b>	<b>5.25%</b>	<b>6.61%</b>	<b>5.34%</b>

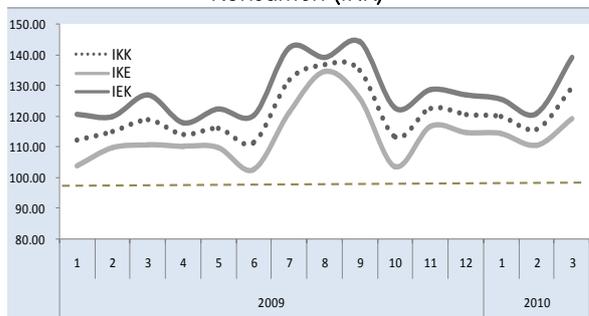
Sumber : BPS diolah  
\*) Prakiraan KBI Ambon

### 1.2.1. Konsumsi

Konsumsi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,85% (y.o.y) dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 3,64%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4,63% (y.o.y) dan kontribusi pertumbuhan sebesar 3,48%. Perbaikan kondisi ekonomi global dan nasional berdampak

positif pula terhadap kondisi perekonomian regional ditandai dengan perbaikan ekspektasi masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

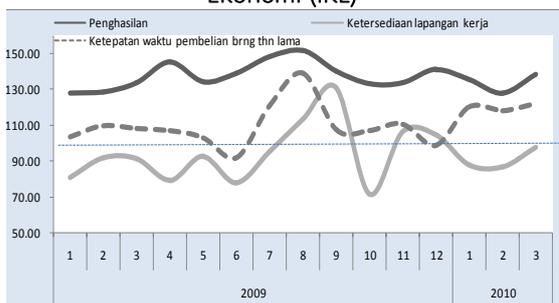
**Grafik 1.2.1.1. Pergerakan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)**



Sumber: Survei Konsumen KBI Ambon

Pertumbuhan konsumsi pada triwulan laporan terutama didorong oleh meningkatnya konsumsi bahan makanan ditandai dengan meningkatnya arus distribusi barang ke wilayah Maluku dan peningkatan produksi komoditas bahan makanan lokal yang dihasilkan. Perayaan Sidi gereja di bulan Maret diperkirakan menjadi salah satu faktor utama pendorong lonjakan konsumsi masyarakat. Harga rata-rata komoditas bahan makanan yang cenderung menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya diperkirakan juga menjadi pendorong peningkatan konsumsi tersebut.

**Grafik 1.2.1.2 Pergerakan Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE)**



Sumber: Survei Konsumen KBI Ambon

**Grafik 1.2.1.3 Pergerakan Indeks Ekspektasi Ekonomi (IEK)**



Sumber: Survei Konsumen KBI Ambon

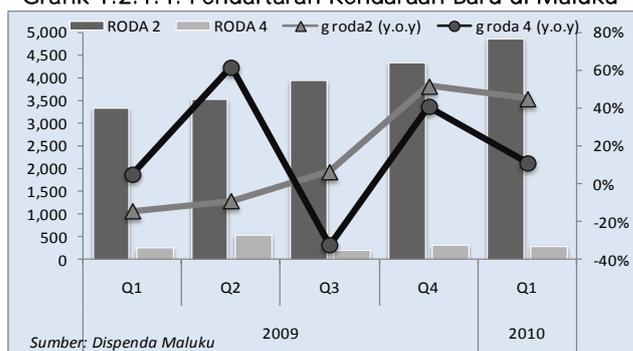
Peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hasil Survei Konsumen bulan Maret 2010 dimana IKK meningkat dari 118,89 pada bulan Maret 2009 menjadi 123,93. Dilihat dari komponennya, peningkatan indeks didorong oleh meningkatnya kedua indeks pembentuk IKK, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE meningkat dari posisi 110,79 pada bulan Maret 2009 menjadi 119,33 pada bulan Maret 2010, sementara IEK pada periode yang sama meningkat dari 126,98 menjadi 139,33.

Peningkatan indikator penghasilan saat ini dari posisi 133,33 pada bulan Maret 2009 menjadi 138,50 pada bulan Maret 2010 dan peningkatan angka ketersediaan lapangan pekerjaan dari 90,95 menjadi 97,50 pada periode yang sama mengindikasikan peningkatan konsumsi pada masyarakat. Besaran kedua indeks tersebut menunjukkan

preferensi masyarakat akan peningkatan pendapatannya sehingga akan meningkatkan daya beli, yang pada gilirannya akan menambah konsumsinya.

Ekspektasi konsumen akan kondisi perekonomian yang telah pulih seperti sebelum krisis keuangan global juga tercermin dari peningkatan pada seluruh komponen indeks baik ketersediaan lapangan kerja, penghasilan maupun perbaikan kondisi ekonomi.

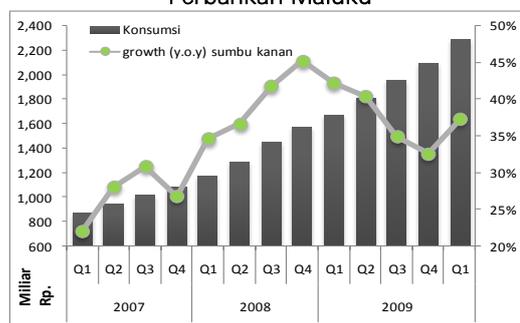
**Grafik 1.2.1.4. Pendaftaran Kendaraan Baru di Maluku**



Peningkatan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari pendaftaran kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) baru di DISPENDA Provinsi Maluku yang pada triwulan laporan masing-masing tercatat meningkat sebesar 45,13% dan 11,15% (y.o.y).

Salah satu sumber dana bagi konsumsi rumah tangga adalah pembiayaan dari perbankan, yaitu Kredit Jenis Penggunaan Konsumsi. Penyaluran Kredit tersebut sampai dengan triwulan laporan tumbuh sebesar 33,73%(y.o.y), meski sedikit melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yang tercatat sebesar 42,24% (y.o.y). Proporsi Kredit Konsumsi yang mencapai 68,81% dari total kredit yang disalurkan juga mengindikasikan kuatnya dominasi sisi konsumsi dalam struktur perekonomian Maluku.

**Grafik 1.2.1.5. Realisasi Kredit Konsumsi oleh Perbankan Maluku**



Sumber: LBU BI

### 1.2.2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

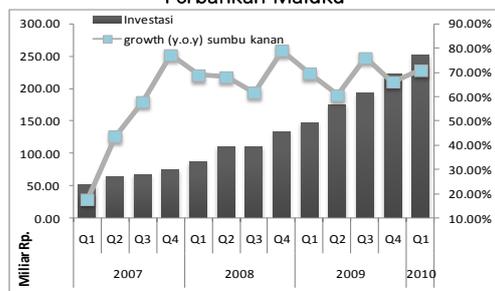
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Triwulan I tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 12,73% (y.o.y) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009 sebesar 4,42% (y.o.y). Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh terjadinya peningkatan anggaran pemerintah terkait dengan penyelenggaraan event berskala internasional di Maluku yaitu *Sa//Banda 2010*, selain itu keberadaan daerah baru hasil pemekaran yang telah mempunyai otonomi sendiri cukup berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nominal belanja pemerintah daerah.

### 1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Regional Bruto (PMTB)/Investasi

Pengeluaran komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada triwulan I tahun 2010 tumbuh positif sebesar 4,09% (y.o.y) meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,96%. Rangkaian perbaikan dan pembangunan fasilitas infrastruktur daerah sebagai bagian dari persiapan even *Sail* Banda 2010 pada triwulan laporan mampu mendorong PMTB Maluku untuk dapat tetap tumbuh disamping proyek-proyek investasi swasta yang sedang dalam pembangunan. Dari sisi investasi, even *Sail* Banda 2010 diperkirakan juga akan mendorong kalangan swasta untuk merealisasikan proyek-proyek sebagai langkah persiapan. Di samping itu, pertumbuhan juga didorong oleh telah mulai beroperasinya industri plat tembaga di pulau Wetar, Kab. Maluku Barat Daya (MBD), yang menelan

investasi sebesar 118 juta dollar Amerika dan produksi sebesar 5 ton/hari.

**Grafik 1.2.3.1. Penyaluran Kredit Investasi oleh Perbankan Maluku**



Sumber data: LBU BI

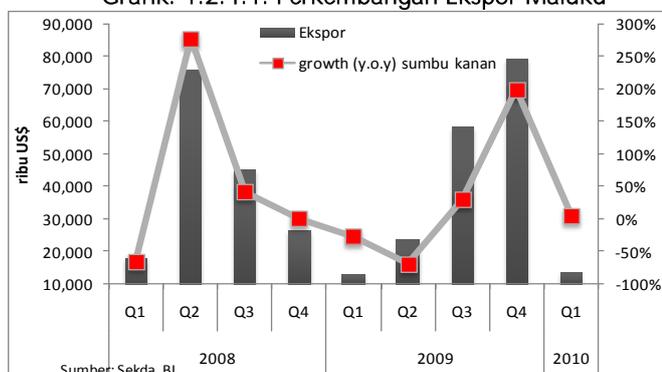
Dari sisi pembiayaan perbankan, realisasi kredit investasi pada triwulan laporan tumbuh sebesar 70,91% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yang tercatat 69,49%(y.o.y).

### 1.2.4. Ekspor dan Impor

Komponen Ekspor triwulan I tahun 2010 tumbuh sebesar 5,19% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,66%(y.o.y). Menguatnya komponen ekspor diperkirakan karena meningkatnya produksi ikan tangkap kualitas ekspor sehubungan dengan telah membaiknya kondisi cuaca dan kembali beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan yang sebelumnya melakukan bongkar muat di luar wilayah Maluku. Faktor pulihnya perekonomian di Negara-negara tujuan ekspor utama seperti Jepang, China dan Thailand

diperkirakan meningkatkan volume ekspor secara cukup signifikan.

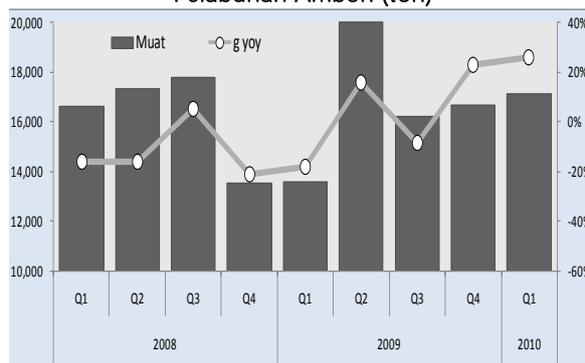
**Grafik. 1.2.4.1. Perkembangan Ekspor Maluku**



Sumber: Sekda BI

Komponen impor pada triwulan laporan diperkirakan tumbuh sebesar 2,84% (y.o.y), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun 2009 yang mencapai 3,34%(y.o.y). Ketergantungan kebutuhan barang dan jasa Maluku terhadap pasokan dari luar daerah menyebabkan sampai dengan saat ini Maluku sebagai *net importir*. Hal ini

Grafik. 1.2.4.2. Perkembangan Kegiatan Muat di Pelabuhan Ambon (ton)



Sumber data: Pelindo IV Ambon

tercermin pada aktivitas bongkar muat pelabuhan laut dan bandara di Ambon dimana aktivitas bongkar lebih mendominasi kegiatan bongkar-muat. Kebutuhan bahan makanan dan barang konsumsi sehari-hari mendominasi sisi impor daerah terutama dipasok dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Impor luar negeri Maluku umumnya berupa komoditas bahan makanan jadi, plastik, karet dan barang dari plastik dan karet serta komponen mesin-mesin dan kendaraan yang terutama didatangkan dari Singapura, Thailand dan Jepang.

### 1.3. Penawaran Daerah

Dari sisi penawaran, pertumbuhan positif terjadi hampir di seluruh sektor ekonomi kecuali sektor listrik gas dan air. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan pada sektor pertanian, sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi. Kinerja sektor pertanian tumbuh didorong oleh meningkatnya produksi ikan tangkap sedangkan pada sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi tumbuh didorong oleh meningkatnya persiapan *Sail* Banda 2010 (baik melalui kegiatan *launching* maupun seminar-seminar) serta pembukaan beberapa rute penerbangan baru yang melayani antar daerah Maluku.

Secara tahunan berdasarkan sektornya, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 6,79% (y.o.y) sektor konstruksi/bangunan yaitu sebesar 6,04% (y.o.y) dan sektor angkutan dan komunikasi sebesar 5,41% (y.o.y). Sementara itu sektor listrik, gas dan air mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,68%(y.o.y). Berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan, sektor pertanian, sektor jasa-jasa lainnya dan sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi menyumbang pertumbuhan tertinggi pada Triwulan I 2010 dengan kontribusi masing- masing sebesar 2,16%, 1,15% dan 1,11%.

Tabel 1.3.1  
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Sektorial Harga Konstan Tahunan (y.o.y)

Sektor Ekonomi	2008				2009				2010
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1*)
Pertanian	5.37%	4.23%	2.69%	-0.49%	2.35%	3.34%	3.81%	6.68%	6.79%
Pertambangan dan Penggalian	12.95%	5.25%	2.51%	-0.01%	-0.47%	3.61%	4.96%	7.67%	5.38%
Industri Pengolahan	5.15%	3.19%	5.25%	4.62%	8.18%	6.72%	6.16%	6.85%	1.71%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.36%	-0.44%	4.21%	1.72%	-16.30%	-13.25%	-14.00%	-22.55%	-7.68%
Konstruksi/Bangunan	5.70%	1.62%	4.11%	6.55%	3.94%	5.98%	7.10%	10.61%	6.04%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.13%	-1.04%	9.90%	11.78%	7.43%	6.27%	5.48%	4.92%	4.28%
Angkutan dan Komunikasi	3.25%	3.20%	6.76%	6.42%	7.14%	7.16%	7.39%	6.35%	5.41%
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4.12%	4.40%	4.32%	4.28%	4.16%	4.61%	4.42%	4.46%	2.94%
Jasa-jasa Lainnya	11.40%	7.04%	1.00%	0.28%	3.81%	4.77%	6.60%	10.03%	6.32%
<b>Share Terhadap Pertumbuhan</b>									
Pertanian	1.74%	1.35%	0.87%	-0.16%	1.08%	1.21%	2.09%	2.16%	2.16%
Pertambangan dan Penggalian	0.09%	0.04%	0.02%	0.00%	0.00%	0.03%	0.04%	0.05%	0.04%
Industri Pengolahan	0.26%	0.16%	0.26%	0.22%	0.41%	0.34%	0.31%	0.33%	0.09%
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0.01%	0.00%	0.02%	0.01%	-0.09%	-0.07%	-0.08%	-0.12%	-0.03%
Konstruksi/Bangunan	0.07%	0.02%	0.05%	0.09%	0.05%	0.08%	0.09%	0.14%	0.08%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.29%	-0.28%	2.44%	2.86%	1.87%	1.60%	1.42%	1.28%	1.11%
Angkutan dan Komunikasi	0.35%	0.34%	0.72%	0.68%	0.77%	0.77%	0.80%	0.69%	0.59%
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.23%	0.24%	0.24%	0.23%	0.23%	0.26%	0.24%	0.24%	0.16%
Jasa-jasa Lainnya	1.97%	1.25%	0.19%	0.05%	0.70%	0.88%	1.23%	1.89%	1.15%
<b>PDRB</b>	<b>5.03%</b>	<b>3.12%</b>	<b>4.82%</b>	<b>3.98%</b>	<b>3.94%</b>	<b>4.95%</b>	<b>5.25%</b>	<b>6.61%</b>	<b>5.34%</b>

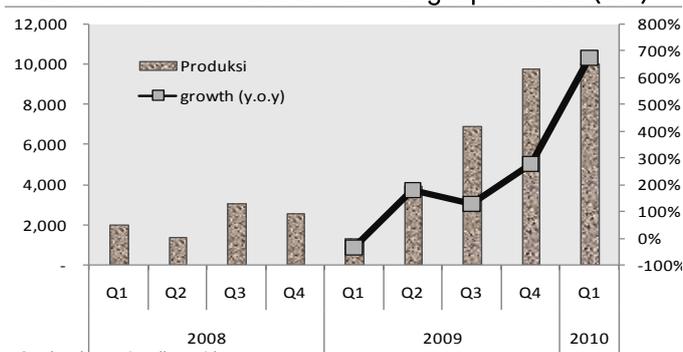
Sumber : BPS diolah  
) Prakiraan KBI Ambon

### 1.3.1. Sektor Pertanian

Pada triwulan I 2010 sektor pertanian tumbuh sebesar 6,79%(y.o.y) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,35% (y.o.y). Hampir seluruh sub sektor pertanian diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan sub sektor perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi.

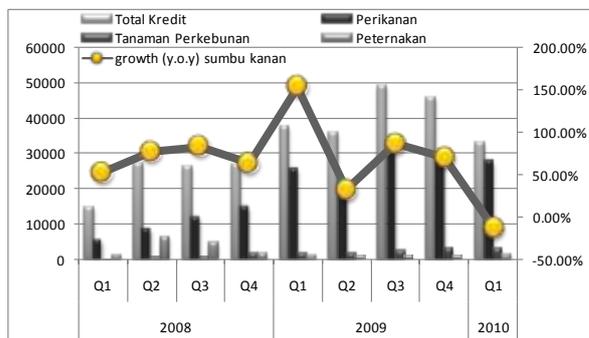
Kinerja pada sub sektor perikanan menunjukkan tren meningkat dikarenakan kondisi cuaca yang mendukung kegiatan penangkapan ikan serta telah kembali beroperasinya kapal-kapal besar yang sebelumnya sempat terganjal perijinan. Peningkatan kinerja sub sektor perikanan terlihat dari produksi ikan tangkap di PPN Ambon pada triwulan ini yang meningkat 675,52% (y.o.y), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 yang mengalami kontraksi sebesar 36,04% (y.o.y). Peningkatan yang sangat signifikan tersebut selain didorong tingginya produksi ikan tangkap juga disebabkan karena rendahnya produksi pada triwulan 1 tahun 2009 sebagai dampak kenaikan BBM tahun 2008 serta adanya isu *illegal fishing*.

Grafik 1.3.1.1. Produksi Ikan Tangkap Maluku (ton)



Sumber: <http://pipp.dkp.go.id>

**Grafik 1.3.1.2 Realisasi Penyaluran Kredit Sektor Pertanian**



Pembiayaan bagi sektor pertanian sampai dengan triwulan laporan realtif masih terbatas, dengan pangsa kredit hanya sebesar 0,99% atau senilai Rp33,1 miliar dari total kredit yang disalurkan perbankan Maluku. Kredit sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 11,80% (y.o.y). Kredit pada sektor ekonomi ini didominasi oleh subsektor

perikanan yang mencapai 84,01% yang tumbuh sebesar 8,24% (y.o.y). Pertumbuhan tertinggi pada sektor pertanian tercatat pada kredit subsektor tanaman perkebunan yang tumbuh sebesar 57,71% (y.o.y). Pencanaan program Gerakan Nasional Kakao pada awal tahun 2010 diperkirakan menjadi pendorong bagi peningkatan realisasi kredit pada subsektor tanaman perkebunan. Hal yang cukup menarik adalah tren kredit pada sub sektor peternakan yang terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2010 ini kredit pada subsektor peternakan tumbuh sebesar 22,55% (y.o.y) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,36% (y.o.y). Pertumbuhan pada sub sektor ini diperkirakan dengan meningkatnya minat masyarakat berusaha di sektor peternakan mengingat kebutuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dan masih bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah.

### 1.3.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,38% (y.o.y) lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun 2008 yang mengalami kontraksi sebesar 0,47%. Sektor ini merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terendah terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Kinerja sektor ini masih tergantung pada pertambangan golongan C, sedangkan untuk jenis kegiatan pertambangan lain relatif terbatas mengingat peta bahan tambang Maluku secara keseluruhan belum tersedia.

Peningkatan pada sektor ini terkait dengan realisasi pembangunan jalan, jembatan dan perbaikan fisik fasilitas umum lainnya serta proyek properti (perumahan, hotel) yang sedang berlangsung di triwulan laporan. Oleh karenanya, upaya Pemda melalui Dinas ESDM Maluku dalam mengidentifikasi potensi tambang di Maluku perlu dilakukan secara serius mengingat sampai dengan saat ini investasi di sektor ini masih terbatas. Di sisi lain potensi dan minat investor cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan telah beroperasinya beberapa perusahaan tambang dan akan dihelatnya event Expo Pertambangan & Energi Maluku 2010

---

### 1.3.3. Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan pada triwulan IV tahun 2009 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 1,71% (y.o.y) lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009 yang mencatat pertumbuhan 8,18%. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,09%. Kondisi musim yang berpengaruh positif pada sebagian besar sektor ekonomi di Maluku berdampak pula pada sektor industri. Perlambatan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan disebabkan karena meningkatnya biaya operasional akibat terjadinya krisis listrik pada triwulan laporan yang berlangsung cukup lama sehingga para pengusaha terpaksa menggunakan *generator set* dalam mengoperasikan usahanya. Hal ini dikonfirmasi dari hasil SKDU Triwulan I 2010 dimana untuk sector Industri Pengolahan tercatat negatif.

### 1.3.4. Sektor Listrik Gas dan Air Bersih (LGA)

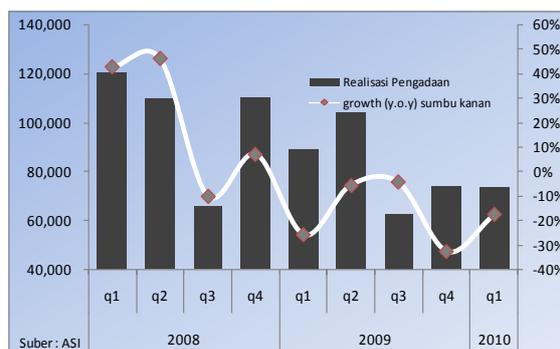
Sektor Listrik dan Air Bersih mengalami kontraksi sebesar 7,68% (y.o.y) pada triwulan I 2010, yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar 16,30% (y.o.y). Kondisi ini sebagai akibat krisis energi listrik yang terjadi di kota Ambon sejak akhir tahun 2009, namun bisa diatasi dengan penyewaan mesin genset dari Singapura yang berkapasitas 10MW oleh PLN dan telah mulai dioperasikan sejak minggu I bulan Maret 2010. Penyewaan mesin genset ini adalah solusi jangka pendek yang ditempuh PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk mengatasi defisit listrik yang dipicu baik dari sisi suplai akibat mesin pembangkit yang sudah tua dan peningkatan permintaan masyarakat. Upaya pengamanan suplai listrik di jangka menengah dan jangka panjang terkendala oleh fasilitas pembiayaan bagi PLN maupun investor swasta.

Dari sisi kontribusi, sektor ini memberikan Kontribusi negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku pada triwulan laporan sebesar 0,03%. Rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku relevan dengan masih rendahnya pembiayaan perbankan kepada sektor ini. Mminimnya permintaan rumah tangga karena banyak yang telah memiliki sumur bor juga mengurangi pergerakan ekonomi pada sub sektor air bersih. Hal ini dikonfirmasi dari hasil SKDU triwulan I 2010 yang memiliki SB negatif.

### 1.3.5. Sektor Bangunan

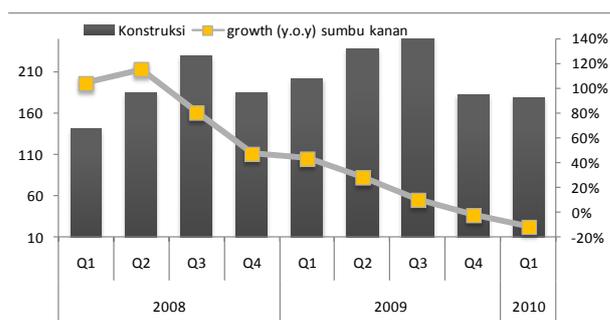
Sektor Bangunan Provinsi Maluku pada triwulan laporan diprakirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,04% (y.o.y). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tumbuh 3,94% (y.o.y). Faktor utama dalam pertumbuhan ini adalah gencarnya pemerintah daerah dan kalangan swasta di Maluku untuk merealisasikan proyek pembangunan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan *Sail* Banda 2010 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2010. Aktifitas konstruksi swasta sebagai pendorong pertumbuhan pada sektor ini tercermin dari pembangunan beberapa sarana akomodasi maupun *guest house* yang dipersiapkan untuk menampung lonjakan wisatawan pada event dimaksud. Di samping itu dapat dilihat dari proyek pelebaran jalan dan perbaikan jembatan dari Bandara Pattimura menuju Kota Ambon dan juga ruas jalan menuju Pantai Natsepa sebagai salah satu lokasi acara.

Grafik 1.3.5.1. Realisasi Pengadaan Semen



Dari sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit ke sektor konstruksi mengalami

Grafik 1.3.5.1 Realisasi Kredit Sektor Konstruksi oleh Perbankan Maluku (Miliar Rp.)



sumber: LBU BI

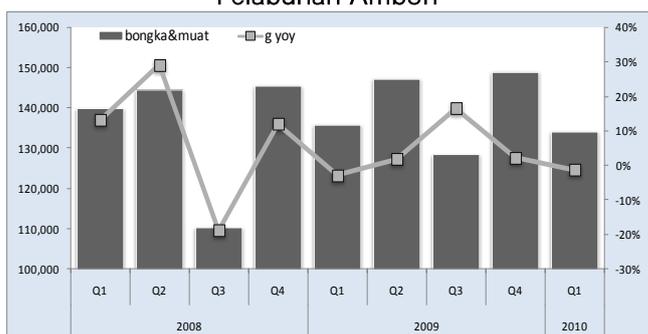
kontraksi sebesar 11,40% (y.o.y) jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2009 yang mencapai 43,44%. Di samping faktor pelunasan termin kredit seiring dengan selesainya proyek pemerintah pada triwulan IV 2009, angka tersebut juga dipengaruhi oleh capaian kinerja di tahun 2008 yang relatif rendah.

Pertumbuhan yang relatif lambat pada sektor bangunan juga terlihat dari realisasi pengadaan semen di wilayah Maluku yang masih menunjukkan tren perlambatan walaupun sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. Realisasi pengadaan semen Maluku mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 17,72%(y.o.y) pada triwulan I 2009 dibandingkan kontraksi sebesar 25,93% (y.o.y) pada triwulan yang sama tahun 2009.

### 1.3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Seiring dengan peningkatan aktivitas konsumsi pada sisi penggunaan, sektor PHR pada triwulan laporan tumbuh sebesar 4,28%(y.o.y). Pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun 2009 sebesar 7,43%(y.o.y) dan menyumbang pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan I 2010 sebesar 1,11%(y.o.y).

**Grafik 1.3.6.1. Kegiatan Bongkar & Muat Barang di Pelabuhan Ambon**

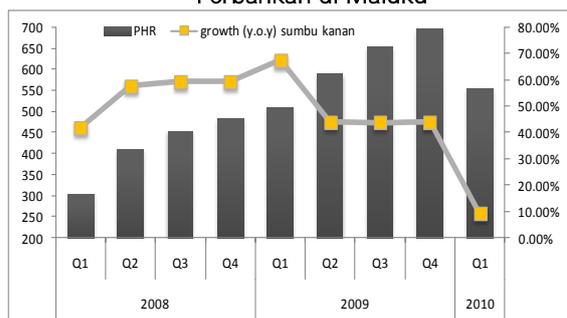


Sumber: Pelindo IV Ambon

Peningkatan aktivitas ekonomi di beberapa daerah akibat terbukanya jalur distribusi terutama di daerah-daerah hasil pemekaran.

Perlambatan pertumbuhan sektor PHR juga tercermin dari volume arus bongkar muat barang di pelabuhan Ambon yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 117,16 ribu ton atau kontraksi sebesar 4,29%(y.o.y) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009. Namun demikian, penurunan tersebut dikompensasi oleh peningkatan barang muat di pelabuhan Ambon yang pada triwulan laporan tercatat 17,116 ton atau tumbuh sebesar 26,17% (y.o.y). Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat kontraksi sebesar 18,37% (y.o.y).

**Grafik 1.3.6.2. Realisasi Kredit Sektor PHR oleh Perbankan di Maluku**



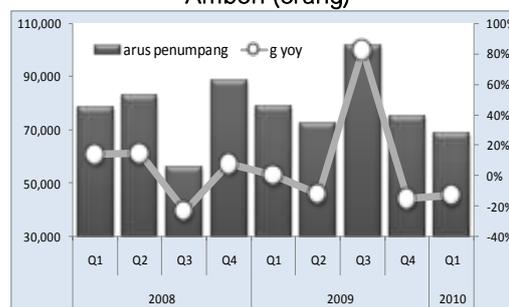
Sumber: LBU BI Ambon

Kondisi pertumbuhan pada sektor PHR juga sejalan dengan perkembangan penyaluran kredit PHR di perbankan wilayah Maluku yang pada triwulan laporan mencatat pertumbuhan sebesar 9,26% (y.o.y), lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009 yang tumbuh sebesar 67,41%(y.o.y). Penurunan kinerja sektor ini secara triwulan juga dikonfirmasi oleh hasil SKDU triwulan I 2010 yang memiliki SB negatif.

### 1.3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Pada triwulan I 2010 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,41% (y.o.y) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat sebesar 7,14% (y.o.y). Pertumbuhan tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,59% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Pendorong kinerja sektor ini adalah sub sektor transpor yang mengalami peningkatan seiring dengan pembukaan beberapa rute penerbangan baru di wilayah Maluku serta adanya kenaikan harga tiket pada moda transportasi angkutan udara.

**Grafik 1.3.7.1. Arus Penumpang di Pelabuhan Ambon (orang)**



Sumber data: Pelindo IV Ambon

Perlambatan pada sektor ini juga terlihat dari arus penumpang di pelabuhan laut kota Ambon yang mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009. Arus penumpang pada triwulan laporan 12,97% (y.o.y) jauh lebih rendah bila

dibandingkan periode yang sama tahun 2009 yang tumbuh sebesar 0,32%.

**Grafik 1.3.8.1. Realisasi Kredit Sektor Angkutan dan Komunikasi oleh Perbankan Maluku (miliar Rp.)**



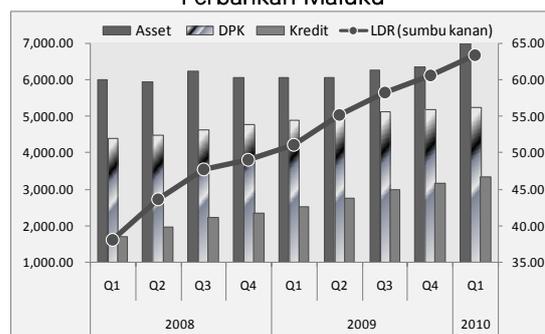
Sumber: LBU BI Ambon

Dilihat dari sisi pembiayaan pada sektor ini, penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 27,28%(y.o.y) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,19% (y.o.y).

### 1.3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan triwulan I tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 2,94% (y.o.y) dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,16%. Sub sektor jasa perbankan diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada sektor ini. Pertumbuhan indikator pokok perbankan terus meningkat,

**Grafik 1.3.8.1. Perkembangan Indikator Pokok Perbankan Maluku**



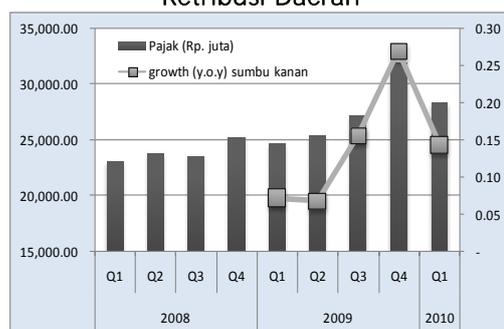
Sumber data: LBU BI

diantaranya pertumbuhan realisasi kredit dan DPK yang cukup tinggi.

### 1.3.9. Sektor Jasa

Sektor Jasa-Jasa pada triwulan I tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6,32% (y.o.y) dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tw I 2010 sebesar 1,15%. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun 2009 yang tercatat tumbuh sebesar 3,81% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 0,70%. Meningkatnya pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan pada sub sektor jasa-jasa pemerintahan Peningkatan aktivitas ekonomi daerah juga mampu mendorong pertumbuhan pada sektor ini.

Grafik 1.3.9.1. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah



Data Dispenda Pemda Maluku

Pertumbuhan pada sektor ini juga sejalan dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi dan pajak yang mengalami pertumbuhan 14,36% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,20%(y.o.y).

## Boks 1

### UPAYA PERCEPATAN KEGIATAN INVESTASI DI MALUKU MELALUI PEMBERIAN INSENTIF & KEMUDAHAN

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah. Kegiatan penanaman modal di Provinsi Maluku selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM). Sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu tujuan penanaman modal hanya dapat berhasil apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Saat ini pemerintah Provinsi Maluku sedang berusaha untuk mengembalikan iklim penanaman modal di Maluku dengan berupaya untuk mengembalikan citra Maluku yang sudah aman dan kondusif (memberikan jaminan keamanan bagi investor) dengan dicanangkannya Gong Perdamaian Dunia pada tahun 2010 dan rencana pelaksanaan *Sail* Banda untuk memperkenalkan wisata bahari di Maluku yang akan berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2010.

Hal ini dipandang perlu untuk terus ditingkatkan mengingat pasca konflik sosial yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 menyebabkan banyak pananam modal khususnya untuk PMDN yang meninggalkan Maluku dan masih ragu untuk kembali lagi menanamkan modalnya. Peningkatan pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan perizinan online serta melalui perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta rupanya belum optimal dalam mengundang investor ke Maluku. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan Investasi di Provinsi Maluku yang menunjukkan tren menurun. Dari tahun 2006 sampai 2009 tidak ada satupun PMDN yang berencana untuk berinvestasi di Maluku, sedangkan untuk PMA pada tahun 2009 terdapat 5 (lima) investor yang berencana untuk menanamkan modalnya namun hanya 1 (satu) yang sampai pada tahapan realisasi.

PMDN							PMA						
THN	RENCANA			REALISASI			THN	RENCANA			REALISASI		
	Proyek	Nilai (Rp.juta)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai (Rp.juta)	Tenaga Kerja		Proyek	Nilai (us\$.Ribu)	Tenaga Kerja	Proyek	Nilai (us\$.Ribu)	Tenaga Kerja
2003	7	282,710.65	615	7	490,236.77	274	2003	10	276,130.84	10,375	9	279,539.93	2,645
2004	3	1,066,050.75	311	3	1,008,003.23	125	2004	4	556,589.79	2,607	4	30,286.36	127
2005	4	35,366.27	312	4	19,240.82	310	2005	4	3,851.00	448	4	4,980.02	41
2006	-	-	-	-	-	-	2006	2	7,408.00	481	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	2007	4	35,911.00	8,253	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-	2008	3	2,121,717.17	432	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	2009	5	22,396,500.00	2,370	1	14,625.00	600
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>1384127.67</b>	<b>1238</b>	<b>14</b>	<b>1,517,480.82</b>	<b>709</b>	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>24,933,108.32</b>	<b>31,986</b>	<b>18</b>	<b>347,431</b>	<b>3,413</b>

Sumber : BPMD Provinsi Maluku - 2010

Faktor lain yang masih menjadi kendala dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kegiatan penanaman modal baik itu PMDN maupun PMA di Maluku yaitu masih kesulitannya PMDN dan PMA dalam masalah perizinan dan masih kurangnya informasi yang disampaikan tentang peluang-peluang bagi penanam modal di Maluku.

Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan kemudahan bagi investor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Beban bagi para investor selama ini dalam menanamkan modalnya di daerah yaitu banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya. Beban tersebut dapat dihapuskan bilamana pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda tentang Pemberian Insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal.

Pemberian insentif dapat berbentuk (pasal 3 PP No. 45 tahun 2008) :

- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- pemberian dana stimulan; dan/atau
- pemberian bantuan modal

Pemberian kemudahan dapat berbentuk (pasal 3 PP No. 45 tahun 2008) :

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- penyediaan lahan atau lokasi;
- pemberian bantuan teknis; dan/atau
- percepatan pemberian perizinan



Sehubungan dengan itu pemerintah pusat kiranya dapat segera mengeluarkan pedoman teknis/draft penyusunan Perda, sebagai dasar oleh pemerintah daerah dalam rangka membuat Perda tersebut. Karena pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal di daerah sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi investor. Hal ini tentunya akan mendorong minat para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan perekonomian di Maluku.

## Boks 2

### *SAIL BANDA 2010 – SMALL ISLANDS FOR OUR FUTURE* AJANG PROMOSI PRODUK UNGGULAN & PARIWISATA MALUKU

Provinsi Maluku memiliki potensi ekonomi dan peluang usaha yang cukup besar dan beragam khususnya di sektor perikanan, pertanian dan pariwisata namun sampai sejauh ini pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi-potensi tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan diselenggarakannya event internasional *Sail Banda* yang pelaksanaannya dimulai bulan juli-agustus 2010 dengan tema “*Small Islands For Our Future (pulau-pulau kecil untuk masa depan kita)*”. Kegiatan ini juga sebagai ajang pembuktian sekaligus promosi tentang potensi-potensi alam yang ada di Maluku, karena nanti juga dilakukan serangkaian kegiatan strategis seperti :

- Pameran *Seafood and Fishery Investment Expo* 2010 dan Maluku Expo 2010
- *Internasional Conference on Small Island*
- Konferensi Kerjasama Indonesia Australia
- *Internasional seminar on sago and spices for food safety*
- Arafura Games
- Lintas Nusantara Remaja Bahari
- *International Diving Tournament*
- *Yacht Rally and Race*
- Kejurnas olahraga perairan dan *game fishing*
- Peringatan Hari Kemerdekaan RI di Pulau Terluar (Kabupaten Maluku Barat Daya)
- Operasi “Surya Baskara Jaya”
- *Navy to Navy talk and port visit.*

Untuk kegiatan pameran Pameran *Seafood and Fishery Investment Expo* 2010 difokuskan untuk mempromosikan pengembangan sumber daya alam lokal di Maluku yang berbasis kelautan dengan memamerkan produk-produk seperti : ikan hias air laut dan tawar, sarana dan prasaran kelautan dan perikanan, teknologi pembenihan dan pengembangan budi daya ikan, serta produk makanan dan minuman hasil UMKM dan lain-lain.

Pameran tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain:

- o Menyebarkan informasi dan potensi industri perikanan dan makanan laut kepada investor dan masyarakat.
- o Meningkatkan dan memberdayakan produksi perikanan di Maluku
- o Memperluas akses pasar perikanan di domestik dan internasional

Sementara Maluku Expo 2010 menampilkan berbagai karya seni dan kerajinan khas produk unggulan dari berbagai sektor ekonomi sejumlah daerah di Indonesia, yang bertujuan untuk :

- o Menjadikan Maluku Expo 2010 sebagai *core event* pameran tahunan nasional
- o Meningkatkan dan memberdayakan produksi Indonesia khususnya sumber daya alam Maluku
- o Mensosialisasikan pembangunan/potensi daerah kepada masyarakat
- o Mempromosikan sekaligus memenuhi kebutuhan produk-produk yang dihasilkan oleh Koperasi, UKM serta mitra binaan BUMN
- o Meningkatkan kecintaan masyarakat pada produksi dalam negeri sekaligus daya saing di pasar global.

Kegiatan *Sail* Banda 2010 yang melibatkan semua pihak baik dari pemerintah, BUMN/BUMD, pelaku usaha dan segenap masyarakat di Maluku ini cukup menarik minat banyak pihak, salah satunya terbukti dengan jumlah kegiatan lomba perahu layar yang akan diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari 20 negara dan total tamu yang akan datang mencapai ribuan orang. Selain itu panitia *Sail* Banda 2010 juga menargetkan putaran uang sebesar Rp2,5 miliar selama penyelenggaraan *Sail* Banda di Kota Ambon. Dengan kegiatan *Sail* Banda 2010 juga diharapkan potensi wisata bahari yang menjadi keunggulan bisa memberikan kontribusi bagi daerah ini, dengan ditampilkannya keindahan bawah laut di Maluku yang sangat menawan, dan juga icon-icon potensi perikanan yang ada di Maluku yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semua sektor ekonomi yang ada di Maluku ini mempunyai peran/pejuang yang sama dalam membangun perekonomian, tinggal bagaimana semua pihak ataupun pelaku usaha yang terlibat mau berusaha untuk memanfaatkan momentum *Sail* Banda 2010 ini sebagai awal kebangkitan perekonomian di Maluku.

## BAB II INFLASI

### 2.1. Gambaran Umum

Secara tahunan (y.o.y) laju kenaikan harga-harga secara umum di Kota Ambon menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan inflasi tercatat 7,08% (y.o.y), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 6,48%. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat 8,84%. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pada bulan Januari 2010 yang tercatat 3,23% (m.t.m). Posisi inflasi Kota Ambon ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang pada triwulan laporan mencapai 3,43%. Kondisi ini sejalan dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya, dimana harga-harga masih terpengaruh oleh kenaikan pada akhir tahun (yang dipengaruhi perayaan Natal dan Tahun Baru) serta pengaruh cuaca buruk yang menghambat proses distribusi barang-barang.

Grafik 2.1.1  
Tren Inflasi Nasional dan Kota Ambon 2005-2010



Sumber: BPS diolah

Sumber utama penyebab inflasi berasal dari lonjakan indeks harga konsumen kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok bahan makanan. Lonjakan peningkatan pada kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sangat dipengaruhi oleh kenaikan pada sub kelompok Angkutan Udara. Pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau didorong oleh kenaikan pada sub kelompok minuman tidak beralkohol dan pendorong inflasi pada kelompok bahan makanan berasal dari sub kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya.

Secara triwulanan (q.t.q), tekanan terhadap harga-harga di kota Ambon pada triwulan laporan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Indeks

.....

Harga Konsumen (IHK) menurun dari 4,81% pada triwulan IV 2009 menjadi 2,84% pada triwulan laporan. hal tersebut terutama didorong adanya perlambatan peningkatan harga pada kelompok bahan makanan yang tercatat sebesar 2,68% (q.t.q) jauh lebih rendah dari laju kenaikan pada triwulan sebelumnya yang tercatat 12,40% (q.t.q). perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang pada triwulan laporan tercatat 8,38% (q.t.q) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 11,96% (q.t.q). Perlambatan tersebut terutama diperkirakan karena faktor pasokan yang telah stabil (setelah cuaca perairan dinyatakan aman untuk pelayaran, sehingga distribusi barang dapat kembali lancar) serta menurunnya permintaan mengingat event yang cukup besar di triwulan laporan adalah perayaan sidi gereja sehingga peningkatan permintaan tidak terlalu signifikan.

Secara bulanan, inflasi pada bulan Maret 2010 mencapai 0,27% (m.t.m). Inflasi yang relatif rendah ini disumbang oleh masih tingginya permintaan terhadap transportasi udara serta peningkatan pada sub kelompok minuman tidak beralkohol.

## 2.2 Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas

Secara tahunan, inflasi yang terjadi pada triwulan laporan terutama didorong oleh inflasi yang terjadi pada 3 (tiga) kelompok utama yaitu kelompok transpor, komunikasi dan

Tabel 2.2.1  
Inflasi Kelompok Komoditas

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
BAHAN MAKANAN	0.28	2.68	9.19
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	0.39	2.30	6.40
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BB	-0.12	0.66	2.08
SANDANG	0.20	0.12	1.92
KESEHATAN	0.10	0.33	1.88
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	-0.02	-0.04	-0.96
TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0.77	8.38	16.94
<b>UMUM</b>	<b>0.27</b>	<b>2.84</b>	<b>7.08</b>

Sumber: BPS diolah

jasa keuangan yang tercatat inflasi sebesar 16,94% (y.o.y), kelompok bahan makanan sebesar 9,19% (y.o.y) dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 6,40% (y.o.y). inflasi tahunan

pada triwulan ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 8,84%. Pada triwulan ini hampir semua kelompok komoditas mengalami inflasi, kecuali satu kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga yang tercatat deflasi sebesar 0,96%.

## 2.3 Inflasi Berdasarkan Sub Kelompok Komoditas

Jika dilihat berdasarkan sub kelompok komoditas, maka sub kelompok komoditas transpor mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan laporan yaitu sebesar 23,47% (y.o.y). Tingginya inflasi pada sub kelompok ini terutama disumbang oleh berakhirnya era

penerbangan murah oleh maskapai penerbangan nasional. Keputusan salah satu maskapai untuk masuk dalam kelas medium berakibat pada meningkatnya harga rata-rata tiket angkutan udara secara keseluruhan.

Berdasarkan perkembangan harga secara triwulanan, sub kelompok ikan segar mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan ini diperkirakan disebabkan oleh adanya cuaca yang kurang kondusif sehingga BMG mengeluarkan larangan melaut pada awal tahun, sehingga nelayan tidak dapat melaut. Sementara itu preferensi konsumsi masyarakat Ambon terhadap komoditas ikan segar adalah ikan hasil tangkapan dari perairan dangkal/ikan-ikan koral. Kedua hal tersebut diperkirakan sebagai faktor utama meningkatnya IHK sub kelompok tersebut.

Tabel 2.3.1  
Ranking Inflasi Sub Kelompok Komoditas Triwulan I 2010

Sub-Kelompok Komoditas	Y.O.Y	Sub-Kelompok Komoditas	Q.T.Q
Transpor	23.47	Ikan Segar	17.11
Minuman yang Tidak Beralkohol	22.64	Transpor	11.33
Sayur-sayuran	20.62	Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	7.94
Bumbu - bumbu	15.14	Minuman yang Tidak Beralkohol	6.18
Ikan Diawetkan	14.34	Makanan Jadi	1.58
Olahraga	13.09	Biaya Tempat Tinggal	1.12
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	10.97	Sandang Anak-anak	1.00
Buah - buahan	9.28	Perawatan Jasmani dan Kosmetika	0.94
Ikan Segar	7.54	Tembakau dan Minuman Beralkohol	0.63
Perlengkapan Rumah tangga	6.01	Penyelenggaraan Rumah tangga	0.43

Sumber BPS diolah

Meskipun secara umum mayoritas sub kelompok komoditas mengalami kenaikan IHK pada triwulan laporan, namun terdapat beberapa sub kelompok yang mengalami penurunan IHK. Sub kelompok rekreasi mengalami penurunan sebesar 4,16% (y.o.y) dan sub kelompok kacang-kacangan mengalami deflasi sebesar 1,11% (y.o.y). Penurunan yang terjadi pada sub kelompok rekreasi diperkirakan didorong oleh semakin banyaknya pasokan serta usia edar beberapa produk yang telah melewati siklus ataupun keluarnya model/serie baru dari pabrikan. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat komoditas-komoditas pada sub kelompok ini merupakan barang-barang elektronik yang harganya semakin hari semakin murah.

Tabel 2.3.2  
Ranking Deflasi Sub Kelompok Komoditas Triwulan I 2010

Sub-Kelompok Komoditas	Y.O.Y	Sub-Kelompok Komoditas	Q.T.Q
Rekreasi	-4.16	Ikan Diawetkan	-12.52
Kacang - kacang	-1.11	Sayur-sayuran	-11.35
Lemak dan Minyak	-1.09	Bumbu - bumbu	-8.12
Jasa Kesehatan	0.00	Buah - buahan	-5.88
Jasa Perawatan Jasmani	0.00	Kacang - kacang	-5.17

Sumber BPS diolah

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2009, maka terjadi kondisi yang sedikit berbeda. Terdapat 3 (tiga) sub kelompok yang mengalami penurunan IHK yang relatif cukup signifikan yaitu : sub kelompok ikan diawetkan, yang mengalami deflasi tertinggi, yaitu sebesar 12,52% (q.t.q), sub kelompok sayur-sayuran deflasi sebesar 11,35% (q.t.q) dan sub kelompok bumbu-bumbuan deflasi sebesar 8,12% (q.t.q). Terjadinya penurunan IHK pada sub kelompok komoditas tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh membaiknya kondisi cuaca serta adanya penurunan permintaan akibat telah berakhirnya perayaan keagamaan maupun tahun baru. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong harga-harga komoditas pada sub kelompok tersebut kembali kepada tingkat yang representatif.

**Kelompok komoditas bahan makanan** sepanjang triwulan I 2010 mengalami inflasi sebesar 9,19% (y.o.y), lebih rendah daripada triwulan yang sama pada tahun 2009 yang tercatat 19,08%. Lancarnya distribusi dan pasokan yang cukup dari produsen luar daerah mampu menekan laju kenaikan IHK.

Tabel 2.3.3

Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan

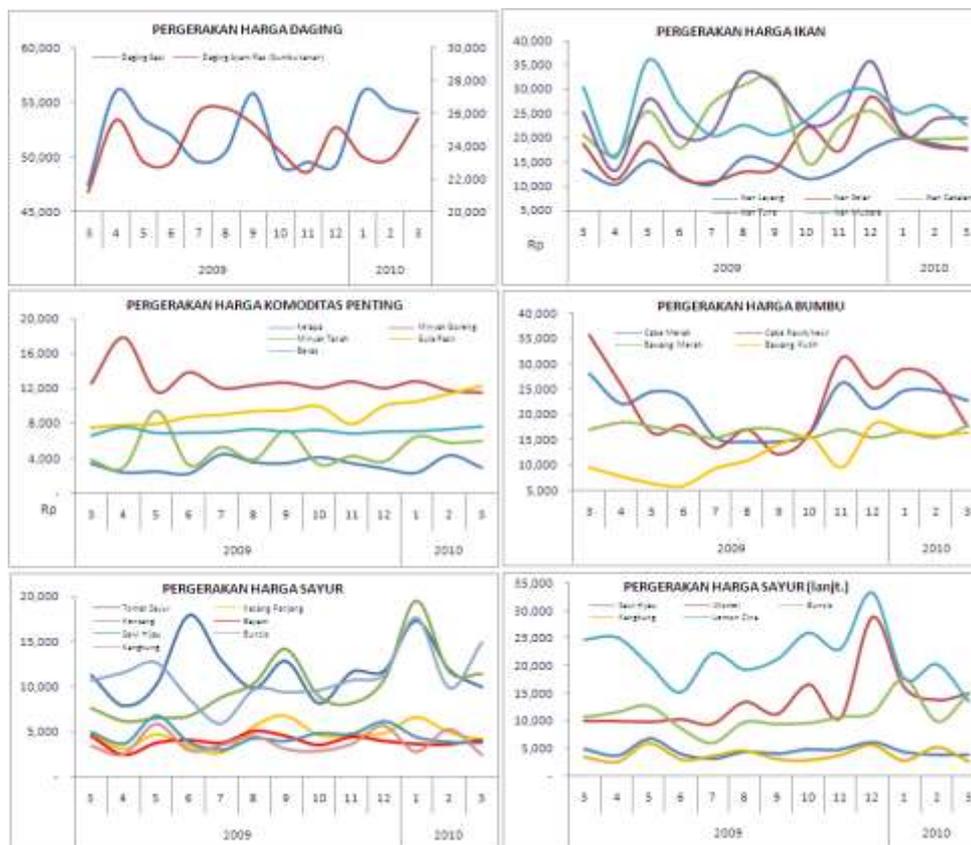
Sub-Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
Sayuran-sayuran	3.42	-11.35	20.62
Telur, Susu dan Hasil-Hasilnya	0.93	-2.58	1.10
Lemak dan Minyak	0.73	-2.16	-1.09
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	0.26	7.94	10.97
Daging dan Hasil-Hasilnya	0.25	-0.70	3.91
Buah - buahan	0.18	-5.88	9.28
Bahan Makanan Lainnya	0.00	0.00	0.37
Ikan Segar	-0.08	17.11	7.54
Bumbu - bumbu	-0.99	-8.12	15.14
Ikan Diawetkan	-4.05	-12.52	14.34
Kacang - kacang	-5.02	-5.17	-1.11

Sumber BPS diolah

Berdasarkan Survei Harga Pasar KBI Ambon, yang dilakukan terhadap lima pasar utama Kota Ambon, terlihat bahwa harga mayoritas komoditas relatif tidak jauh berbeda dibandingkan posisi bulan yang sama pada tahun 2009. Pergerakan harga komoditas menunjukkan kecenderungan tren yang sejalan, dan secara rata-rata terjadi perlambatan kenaikan harga yang relatif cukup signifikan.

Grafik 2.3.1

Pergerakan Harga Rata-rata Bulanan Kelompok Komoditas Bahan Makanan



Sumber Survei Harga Pasar KBI Ambon

Kelompok komoditas makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau pada triwulan laporan mencatat pertumbuhan inflasi sebesar 6,40% (y.o.y). Posisi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 yang mencatat inflasi sebesar 4,67%. Inflasi yang terjadi pada kelompok komoditas ini terjadi lebih dikarenakan terjadinya kenaikan harga dari produsen sementara permintaan masyarakat relatif tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.3.5  
Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	0.39	2.30	6.40
Makanan Jadi	0.07	1.58	2.60
Minuman yang Tidak Beralkohol	1.82	6.18	22.64
Tembakau dan Minuman Beralkohol	0.01	0.63	5.01

Sumber BPS diolah

Sub kelompok minuman yang tidak beralkohol mencatat laju inflasi tertinggi yakni sebesar 22,64% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009 yang sebesar 6,82%. Tingginya inflasi pada sub kelompok ini terutama terjadi dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada komoditas gula pasir yang secara nasional mengalami keterbatasan stok. Tidak adanya sumber produksi gula pasir di Maluku membuat harga semakin sulit turun karena harga dari daerah pemasok sudah tinggi.

Kelompok komoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 2,08% (y.o.y) jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009 yang sebesar 6,42%. Meski inflasi relatif cukup rendah namun terdapat sub kelompok komoditas yang mencatat inflasi cukup tinggi yakni sub kelompok komoditas perlengkapan rumah tangga yang mencatat inflasi sebesar 6,01% (y.o.y). Kenaikan IHK pada sub kelompok tersebut diperkirakan lebih dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan sementara itu tingkat permintaan relatif tinggi.

**Tabel 2.3.6**  
Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BB	-0.12	0.66	2.08
Biaya Tempat Tinggal	-0.27	1.12	2.01
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	0.00	0.03	0.16
Perlengkapan Rumah tangga	0.08	0.10	6.01
Penyelenggaraan Rumah tangga	0.09	0.43	0.55

Sumber BPS diolah

Kelompok sandang pada periode laporan mencatat inflasi sebesar 1,92% (y.o.y) dan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,42% (y.o.y). Seluruh sub kelompok komoditas mengalami inflasi dengan sub kelompok sandang laki-laki mencatat kenaikan tertinggi yaitu 2,24% (y.o.y) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 yang mencatat deflasi sebesar 0,48%. Kenaikan biaya produksi yang ditanggung produsen diperkirakan sebagai faktor utama pendorong kenaikan IHK pada kelompok ini.

**Tabel 2.3.7**  
Inflasi Kelompok Sandang

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
SANDANG	0.20	0.12	1.92
Sandang Laki-laki	0.19	0.26	2.42
Sandang Wanita	0.02	0.05	2.14
Sandang Anak-anak	0.88	1.00	2.16
Barang Pribadi dan Sandang Lain	-0.06	-0.56	0.94

Sumber BPS diolah

Kelompok kesehatan mencatat inflasi sebesar 1,88% (y.o.y) sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan I 2009 yang mencatat inflasi sebesar 1,78%. Pertumbuhan inflasi tertinggi dicatat oleh sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika yaitu sebesar 3,62% (y.o.y) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2009 yang mencatat inflasi sebesar 2,43%. Kenaikan harga dari produsen diperkirakan menjadi faktor utama pendorong inflasi pada komoditas ini.

**Tabel 2.3.8**  
Inflasi Kelompok Kesehatan

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
KESEHATAN	0.10	0.33	1.88
Jasa Kesehatan	0.00	0.00	0.00
Obat-obatan	0.04	-0.41	1.34
Jasa Perawatan Jasmani	0.00	0.00	0.00
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	0.19	0.94	3.62

Sumber BPS diolah

Perkembangan IHK di kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga pada akhir triwulan laporan mencatat deflasi sebesar 0,96% (y.o.y) jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 4,48%. Sub kelompok olahraga mencatat laju inflasi tertinggi sebesar 13,09% (y.o.y) jauh lebih tinggi

dibandingkan periode yang sama tahun 2009 yang mencatat inflasi sebesar 0% atau tidak mengalami perubahan dibandingkan periode yang sama di tahun 2008. Pada kelompok ini sub kelompok rekreasi mencatat laju deflasi tertinggi sebesar 4,16% (y.o.y).

Tabel 2.3.9  
Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	-0,02	-0,04	-0,96
Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Kursus-kursus / Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	0,00	0,00	0,10
Rekreasi	-0,07	-0,13	-4,16
Olahraga	0,00	0,00	13,09

Sumber BPS diolah

**Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan** adalah penyumbang utama terjadinya inflasi pada triwulan laporan. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 16,94% (y.o.y) jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 9,16%. Pendorong utama perubahan IHK pada kelompok ini adalah tingginya perubahan IHK sub kelompok transpor yang mencapai 23,47% (y.o.y). Peningkatan pada sub kelompok transpor terutama dipicu oleh berakhirnya era penerbangan murah oleh maskapai nasional, serta masuknya maskapai nasional yang sebelumnya berada di kelas penerbangan murah menjadi kelas penerbangan medium. Hal ini berdampak pada kenaikan harga tiket secara rata-rata, sementara itu permintaan

Tabel 2.3.10  
Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok Komoditas	M.T.M	Q.T.Q	Y.O.Y
TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN	0,77	8,38	16,94
Transpor	1,02	11,33	23,47
Komunikasi Dan Penginapan	0,00	0,00	0,00
Sarana dan Penunjang Transpor	0,00	0,00	1,02
Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,70

Sumber BPS diolah

masyarakat tetap dan cenderung meningkat. Peningkatan permintaan ini terlihat dari arus penumpang melalui Bandara Pattimura yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Seiring dengan rencana dibukanya rute penerbangan baru oleh beberapa maskapai (baik yang berskala nasional maupun lokal Maluku), maka diperkirakan laju kenaikan IHK pada sub kelompok ini akan dapat ditekan pada waktu-waktu mendatang. Hal ini dikarenakan tingkat penawaran akan lebih memenuhi tingkat permintaan masyarakat.



*halaman ini sengaja dikosongkan*

## BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN REGIONAL

### 3.1. Perkembangan Kinerja Perbankan

Perkembangan perbankan daerah di Maluku pada triwulan I tahun 2010 menunjukkan arah positif yang tercermin dari perkembangan indikator pokok perbankan seperti *Asset*, *outstanding* Dana Pihak Ketiga (DPK) serta kredit. Perkembangan tersebut juga tercermin dari jumlah kantor bank di wilayah kerja KBI Ambon yang bertambah 3 kantor sehingga total jaringan kantor bank di Maluku menjadi 102 kantor. Ketiga jaringan kantor bank yang baru tersebut adalah KCP Mandiri Tual, PT. Bank Maluku KCP Namrole, Kab. Buru Selatan dan PT. Bank Maluku KCP Namlea, Kab. Buru.

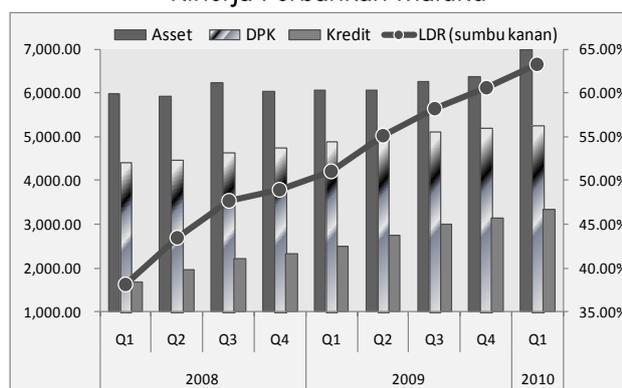
Di lihat dari sisi kinerja keuangan, *Asset* perbankan Maluku pada triwulan laporan tumbuh sebesar 15,21% (y.o.y) atau meningkat senilai Rp 923,2 miliar sehingga total *Asset* menjadi Rp 6,99 triliun. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2009 dimana *Asset* tumbuh sebesar 1,31% (y.o.y). Peningkatan tersebut selain didorong

oleh pertumbuhan DPK sebesar 7,57% (y.o.y) dan ditunjang oleh agresifnya realisasi pencairan kredit oleh perbankan daerah sehingga kredit tumbuh sebesar 33,28%. Pertumbuhan yang tinggi tersebut mendorong *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencapai 63,29% pada akhir triwulan I 2010, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun

2009 yang tercatat 51,09%.

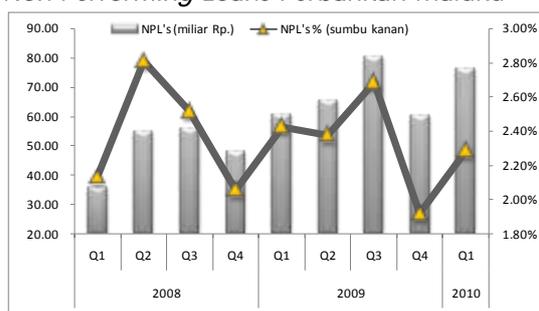
Grafik 3.1.1

Kinerja Perbankan Maluku



Grafik 3.1.2

*Non Performing Loans* Perbankan Maluku



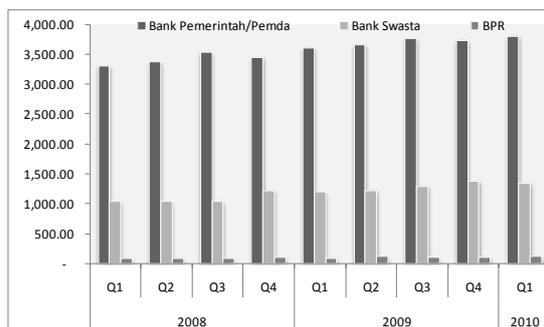
Peningkatan penyaluran kredit tersebut diiringi peningkatan kualitas kredit yang tercermin dari tingkat *Non Performing Loans* (NPL's) yang relatif rendah. Pada triwulan I tahun 2010 tercatat NPL's sebesar 2,28%, lebih rendah dibandingkan NPL's

triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 2,42%.

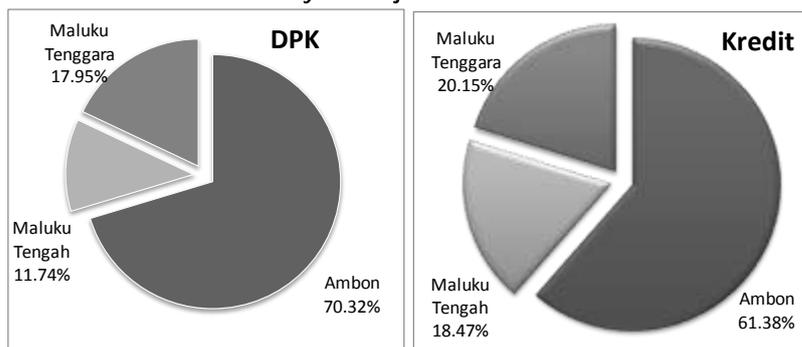
Secara triwulanan (q.t.q), DPK meningkat sebesar 1,1%, Kredit meningkat sebesar 5,67% sehingga mendorong peningkatan LDR sebesar 2,74%. Sementara itu kualitas kredit cenderung menurun, yang tercermin dari meningkatnya NPL's sebesar 0,37% sehingga pada triwulan laporan NPL's perbankan Maluku mencapai 2,28%. Secara nominal peningkatan NPL's tercatat sebesar Rp15,65 miliar dari Rp60,33 miliar pada Triwulan IV 2009 menjadi Rp75,97 miliar pada triwulan laporan.

Dilihat dari jenisnya, bank-bank milik pemerintah/daerah (BUMN dan BPD) masih mendominasi perkembangan perbankan Maluku. Pada triwulan laporan, pangsa *Asset* bank milik pemerintah tercatat sebesar 73,57%, pangsa kredit sebesar 78,36% dan pangsa DPK sebesar 72,34%. *Asset* Perbankan Pemerintah/Pemda meningkat cukup signifikan sebesar Rp609.96 miliar yang didorong oleh adanya penambahan kantor cabang baru serta telah selesainya pembangunan salah satu kantor bank. Kondisi tersebut juga langsung terlihat dampak positifnya pada terjadinya peningkatan jumlah DPK yang berhasil dihimpun.

**Grafik 3.1.3**  
Pertumbuhan *Asset* Perbankan Maluku



**Grafik 3.1.4**  
Pertumbuhan DPK dan Kredit Perbankan Maluku Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Bank



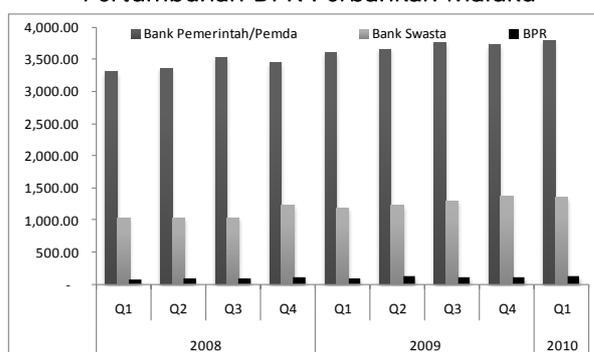
Berdasarkan wilayah kerja kantor penghimpun dana maupun penyaluran kredit, maka kantor-kantor bank yang berada di wilayah Kota Ambon masih mendominasi pencapaian pada

triwulan laporan dengan pangsa DPK sebesar 70,32% dan pangsa kredit sebesar 61,38%. Sementara itu kinerja perbankan di wilayah Maluku Tenggara (Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual, Kab. Kep. Aru, Kab. Maluku Tenggara Barat) tercermin pada pangsa DPK sebesar 17,95% dan pangsa realisasi kredit sebesar 20,15%, dan wilayah Maluku Tengah (Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram Bag. Timur, Kab. Seram Bag. Barat, Kab. Buru dan Kab. Buru Selatan) tercatat mendapatkan pangsa sebesar 11,74% dalam penghimpunan DPK dan

18,47% dalam realisasi kredit perbankan. Kondisi ini juga sejalan dengan situasi ekonomi di Maluku yang masih terpusat di kota Ambon dan Kota Tual (Kab. Maluku Tenggara) dengan adanya pelabuhan perikanan di kedua kota tersebut. Upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana di daerah, seperti dengan pembangunan dermaga dan bandara diperkirakan akan meningkatkan kinerja perbankan daerah seiring dengan peningkatan kegiatan perekonomian.

### 3.2. Penghimpunan Dana Masyarakat/Dana Pihak Ketiga

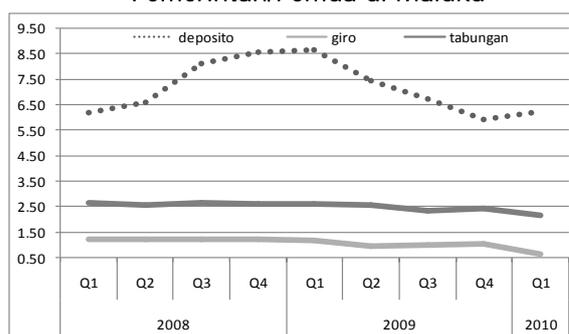
**Grafik 3.2.1**  
Pertumbuhan DPK Perbankan Maluku



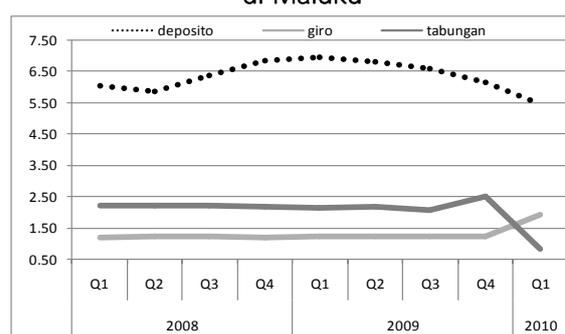
Secara tahunan, pada triwulan laporan DPK perbankan Maluku mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% (y.o.y) sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2009 yang tumbuh sebesar 10,77% (y.o.y). Perbankan milik pemerintah/Pemda masih mendominasi dengan pangsa pasar DPK sebesar 72,34% atau secara nominal meningkat

sebesar Rp196,66 miliar dibandingkan triwulan I tahun 2009. Perbankan swasta dan BPR juga menunjukkan kinerja yang positif dengan masing-masing mengalami peningkatan DPK sebesar 12,39% dan 29,15% (y.o.y) atau masing-masing senilai Rp147,65 miliar dan Rp25,89 miliar.

**Grafik 3.2.2**  
Pergerakan Suku Bunga DPK Bank Pemerintah/Pemda di Maluku



**Grafik 3.2.3**  
Pergerakan Suku Bunga DPK Bank Swasta di Maluku

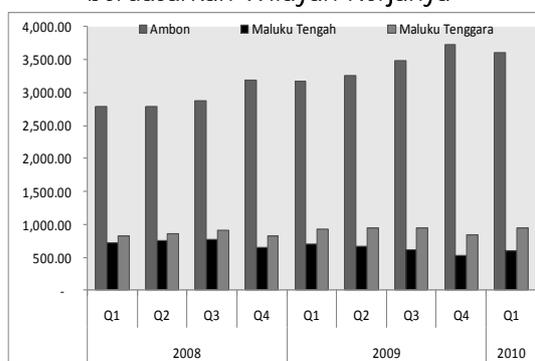


Dari sisi suku bunga, tingkat suku bunga rata-rata perbankan milik pemerintah/Pemda relatif lebih rendah dibandingkan suku bunga rata-rata bank swasta. Secara konsisten terlihat bahwa perbankan milik pemerintah/Pemda cenderung menurunkan suku bunga deposito sejalan dengan penurunan BI-rate sejak awal tahun 2009, sementara itu suku bunga rata-rata perbankan swasta masih relatif lebih tinggi dibandingkan perbankan milik pemerintah/Pemda.

Peningkatan rata-rata suku bunga giro di perbankan milik pemerintah/pemda pada triwulan laporan berdampak pada peningkatan DPK perbankan milik pemerintah/Pemda. Tingkat rata-rata suku bunga giro yang lebih tinggi dari rata-rata suku bunga tabungan juga berdampak pada penurunan tabungan di perbankan Maluku secara umum. Faktor tersebut diperkirakan menjadi penyebab utama penurunan DPK perbankan swasta.

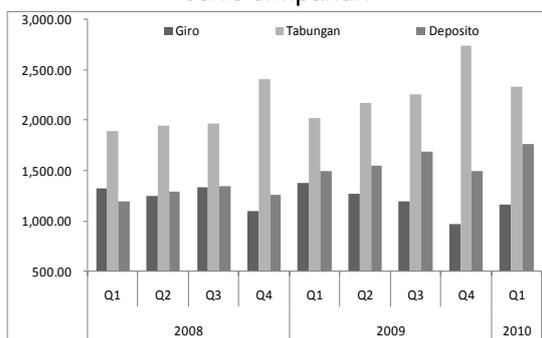
Pada triwulan laporan pangsa dana-dana murah tersebut sebesar 66,53% dari total DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Masih besarnya *spread* suku bunga deposito dan tabungan yang cukup tinggi mendorong penempatan dana masyarakat di deposito masih cukup tinggi.

**Grafik 3.2.4**  
Perkembangan DPK Perbankan Maluku berdasarkan Wilayah Kerjanya



Berdasarkan wilayah kerjanya, DPK perbankan di wilayah Ambon mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,90% (q.t.q) atau senilai Rp110,39 miliar dari posisi triwulan sebelumnya yang tercatat Rp3,81 triliun. Sementara itu di wilayah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara terjadi peningkatan DPK masing-masing sebesar 13,92% (q.t.q) dan 10,83% (q.t.q). Hal tersebut mengindikasikan mulai terjadinya pemerataan kegiatan perekonomian ke wilayah-wilayah di luar Kota Ambon.

**Grafik 3.2.5**  
Perkembangan DPK Perbankan Maluku per Jenis Simpanan

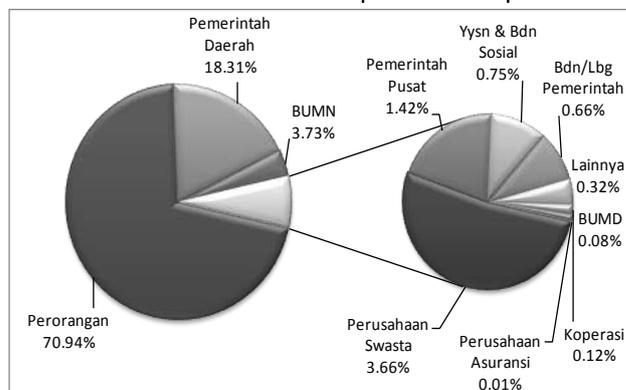


Berdasarkan jenis simpanan, tabungan masih mendominasi DPK Perbankan Maluku. Tabungan menyumbang 44,36% dari total DPK menurun dibandingkan triwulan IV 2009 yang tercatat sebesar 52,63%. Sementara itu deposito dan giro masing-masing menyumbang pangsa sebesar 33,47% dan 22,17% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat 28,74% dan 18,63%. Komposisi DPK

tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung menyimpan dananya di deposito yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dan siklus awal tahun yang relatif belum membutuhkan dana lancar dalam jumlah yang cukup besar, mengingat umumnya transaksi pembayaran dilakukan di akhir tahun.

Peningkatan giro yang cukup signifikan mengindikasikan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi yang diperkirakan sebagai bagian dari persiapan even *Sail* Banda 2010 selain dana *dropping* dari Pemerintah Pusat yang belum direalisasikan.

**Grafik 3.2.6**  
DPK Perbankan Maluku per Jenis Deposan



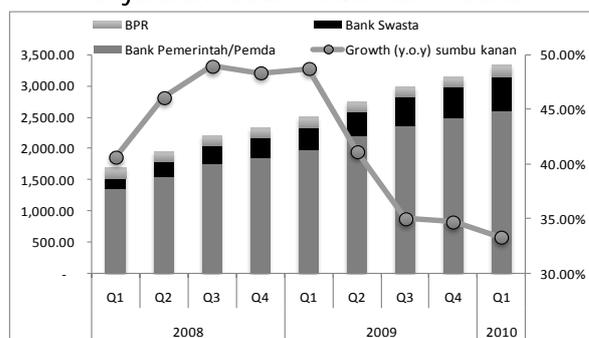
Sampai dengan triwulan laporan, proporsi DPK milik perorangan masih mendominasi dengan pangsa sebesar 70,94% menurun dibanding posisi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 78,74%. Penurunan ini juga disebabkan meningkatnya dana Pemerintah daerah di perbankan yang tercatat tumbuh sebesar 186,5% (q.t.q) atau senilai Rp626,6 miliar. Selain

untuk membiayai pengeluaran rutin, peningkatan dana pemerintah daerah tersebut diperkirakan merupakan dana untuk membiayai rangkaian persiapan pelaksanaan even *Sail* Banda 2010, diantaranya proyek perbaikan infrastruktur.

### 3.3. Penyaluran Kredit Perbankan

#### 3.3.1. Penyaluran Kredit Perbankan di Maluku

**Grafik 3.3.1.1**  
Penyaluran Kredit Perbankan Maluku

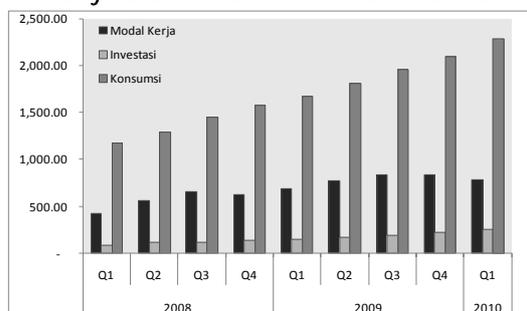


Total realisasi kredit perbankan Maluku pada triwulan I 2010 tercatat sebesar Rp.3,33 triliun. Pencapaian tersebut tercatat tumbuh sebesar 33,28% (y.o.y). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pencapaian pada periode yang sama di tahun 2009 yang tercatat tumbuh sebesar 48,74% (y.o.y). Faktor sebagai perbankan yang mempunyai *asset*

serta DPK terbesar menyebabkan perbankan milik pemerintah/Pemda menguasai realisasi kredit di Maluku dengan nominal sebesar Rp2,61 triliun atau pangsa sebesar 78,36%. Perbankan swasta di Maluku terus menunjukkan kinerja positifnya dengan mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi pada triwulan laporan yaitu sebesar 54,92% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan milik pemerintah/pemda yang tumbuh sebesar 32,10%. Penetrasi pasar perbankan swasta tersebut juga tercermin dari meningkatnya penguasaan pangsa kredit di Maluku sebesar 16,31%, meningkat sebesar 0,3% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu BPR juga menunjukkan kinerja

yang positif dengan mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 2,76% (y.o.y) atau senilai Rp4,67 miliar dibandingkan triwulan I tahun 2009.

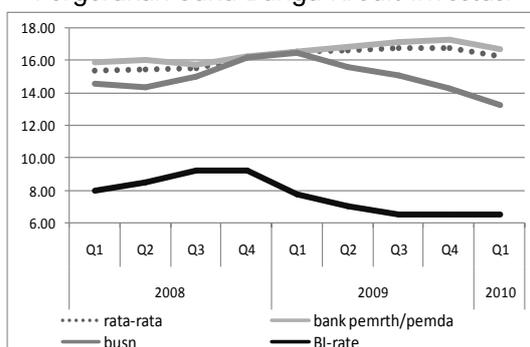
**Grafik 3.3.1.2**  
Penyaluran Kredit Perbankan Maluku



Secara tahunan pertumbuhan kredit perbankan Maluku meningkat sebesar 33,28% atau menjadi Rp3,33 triliun dari posisi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,49 triliun. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan jenis kredit Investasi sebesar 72,93% (y.o.y) atau senilai Rp106,38 miliar sehingga menjadi Rp252,25 miliar.

Kredit jenis Modal Kerja tumbuh sebesar 14,93% (y.o.y) atau senilai Rp102,13 miliar menjadi Rp785,81 miliar pada triwulan laporan. Sementara itu, kredit jenis konsumsi mengalami pertumbuhan 37,33% (y.o.y) atau senilai Rp622,38 miliar sehingga pada triwulan laporan penyaluran kredit konsumsi tercatat sebesar Rp2,29 triliun. Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Maluku yang masih didorong oleh konsumsi masyarakat. Pangsa kredit konsumsi Maluku pada triwulan I tahun 2010 tercatat mencapai 68,81% dari total realisasi senilai Rp3,33 triliun. Beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi lambatnya pertumbuhan kredit produktif seperti kredit investasi dan kredit modal kerja, adalah periode awal tahun sehingga proyek-proyek pemerintah masih dalam tahap perencanaan serta masih relatif tingginya suku bunga kredit yang ditawarkan pihak perbankan.

**Grafik 3.3.1.3**  
Pergerakan Suku Bunga Kredit Investasi

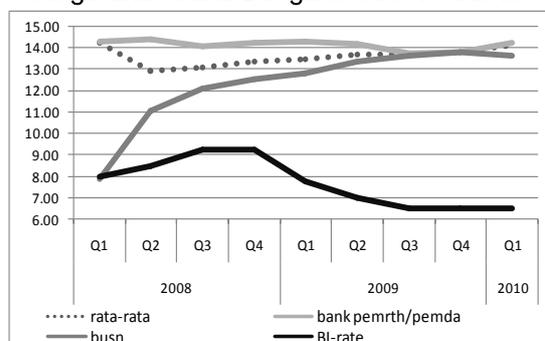


Pergerakan suku bunga Kredit Investasi (KI) mulai menurun pada triwulan I 2009 seiring dengan tingkat suku bunga acuan (BI-rate) yang diturunkan setelah sempat berada pada angka 9,25 pada saat puncak krisis keuangan global. Secara umum terlihat bahwa bank swasta nasional lebih responsif dalam menyikapi penurunan BI-rate tersebut. Secara rata-rata, tingkat suku bunga kredit investasi

masih relatif tinggi karena perbankan milik pemerintah/pemda sebagai penyalur kredit utama masih belum signifikan dalam menurunkan suku bunga kreditnya. Kondisi ini memberatkan sektor usaha, mengingat perbankan umum telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai penetapan batas maksimal suku bunga. Dengan suku

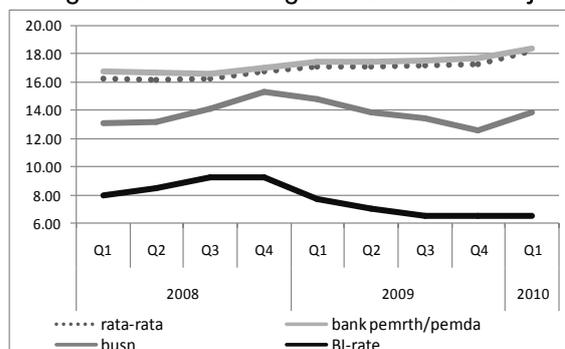
bunga bank umum swasta nasional yang telah sedemikian rendah, maka perbankan milik pemerintah/pemda diperkirakan tidak akan lama lagi akan menurunkan suku bunga kreditnya ke tingkat yang wajar/moderat.

**Grafik 3.3.1.4**  
Pergerakan Suku Bunga Kredit Konsumsi



Pada Kredit Konsumsi sebagai kredit utama perbankan Maluku, terlihat situasi yang sedikit berbeda. Meskipun suku bunga rata-rata Kredit Konsumsi masih paling rendah apabila dibandingkan dengan kedua jenis kredit yang lain, namun tingkat suku bunga jenis kredit ini terlihat tidak terpengaruh dengan penurunan suku bunga acuan. Terlihat bahwa suku bunga yang diberikan oleh bank swasta berada di bawah suku bunga bank milik pemerintah/Pemda. Namun demikian, terlihat terdapat tren meningkatnya tingkat suku bunga kredit konsumsi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini diperkirakan terkait dengan mulai jenuhnya pasar produk ini, yang ditandai dengan penurunan kualitas kredit (NPL's meningkat), sehingga perbankan berusaha mengkompensasi peningkatan resiko tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga kredit.

**Grafik 3.3.1.5**  
Pergerakan Suku Bunga Kredit Modal Kerja

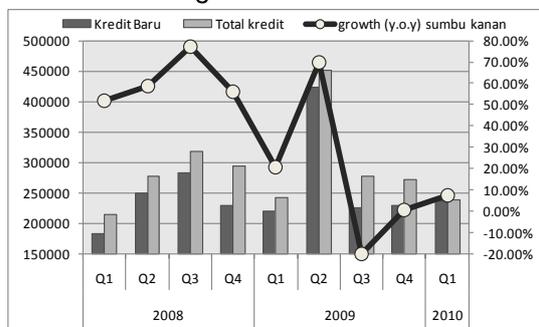


Pergerakan suku bunga rata-rata Kredit Modal Kerja (KMK) menunjukkan anti-trend terhadap pergerakan BI-rate, yang terutama terjadi pada perbankan milik pemerintah/pemda. Sementara itu suku bunga rata-rata KMK bank swasta meningkat sebesar 1,27% atau menjadi 13,88% dari posisi triwulan IV 2009 yang tercatat 12,61%. Beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi adalah tingginya NPL's pada kredit jenis penggunaan ini serta biaya bunga yang masih tinggi. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tingginya penilaian resiko kepada sektor usaha oleh perbankan mengingat kondisi perekonomian yang belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya dari dampak krisis keuangan global.

Kondisi perekonomian makro dan mikro yang kurang kondusif serta besarnya suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan langsung terlihat dampaknya terhadap pertumbuhan kredit baru yang cenderung relatif stagnan. Kondisi perekonomian yang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan tercermin dari realisasi kredit baru yang pada triwulan

I 2010 tumbuh sebesar 7,55% (y.o.y). Dilihat secara triwulanan, realisasi Kredit Baru pada triwulan laporan juga tumbuh positif sebesar 2,76% (q.t.q) dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2009 yang mencatat pertumbuhan 1,74% (q.t.q).

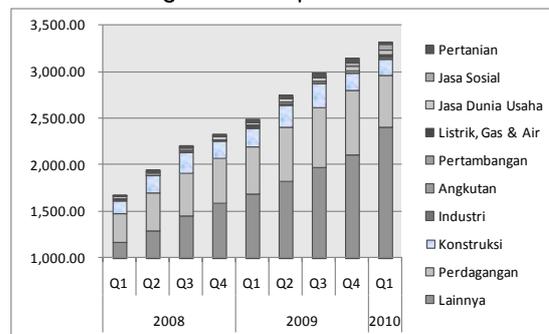
**Grafik 3.3.1.6**  
Perkembangan Realisasi Kredit Baru



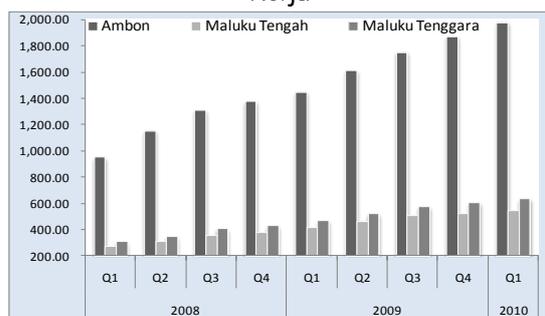
Rencana pelaksanaan event berskala internasional di Maluku pada bulan Juli-Agustus 2010, yaitu *Sail* Banda 2010 diperkirakan akan meningkatkan realisasi kredit modal kerja mengingat beberapa proyek perbaikan dan pembangunan infrastruktur oleh Pemda telah diagendakan dan beberapa sudah memasuki tahap pengerjaan.

Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit perbankan Maluku masih didominasi oleh sektor Lainnya, sektor Perdagangan dan sektor Konstruksi dengan pangsa masing-masing sebesar 72,25%, 16,71% dan 5,38%. Sementara itu dilihat dari sisi pertumbuhannya, secara tahunan (y.o.y) pertumbuhan tertinggi berada di sektor Listrik, gas & air yang mencatat pertumbuhan sebesar 2764,53% yaitu dari Rp170 juta pada triwulan I tahun 2009 menjadi Rp4,93 miliar pada triwulan laporan. Sektor lain yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor jasa sosial yang tumbuh sebesar 1525,25% atau menjadi Rp60,32 miliar dan sektor Industri Pengolahan sebesar 98,62% atau senilai Rp17,94 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor produktif mulai menjadi sektor alternatif bagi perbankan, ketika sektor-sektor utama mulai mengalami kontraksi pertumbuhan.

**Grafik 3.3.1.7**  
Perkembangan Kredit per Sektor Ekonomi



**Grafik 3.3.1.8**  
Perkembangan Kredit Berdasarkan Wilayah Kerja



Berdasarkan wilayah kerja, wilayah Kota Ambon masih menjadi penyaluran kredit tertinggi yakni sebesar 61,38% kemudian diikuti oleh wilayah Maluku Tenggara sebesar 20,15% dan wilayah Maluku Tengah sebesar 18,47%. Dari sisi pertumbuhan, secara tahunan penyaluran kredit di wilayah Kota Ambon mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 22,03% (y.o.y), diikuti oleh wilayah

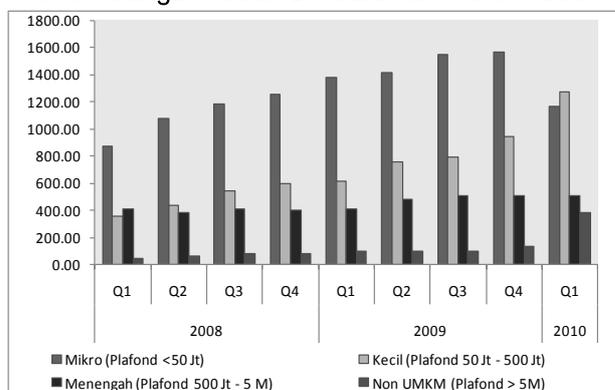
Maluku Tenggara yang tumbuh 36,48%(y.o.y) dan wilayah Maluku Tengah tumbuh sebesar 33,33% (y.o.y). Besaran pertumbuhan kredit per wilayah tersebut mengindikasikan bahwa di daerah-daerah di luar Kota Ambon mulai menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring dengan giatnya pembangunan infrastruktur fisik dan transportasi oleh kabupaten-kabupaten. Pencapaian kinerja perbankan tersebut juga mulai mengikis anggapan bahwa wilayah di Luar Kota Ambon sebagai daerah yang hanya potensial untuk penggalangan DPK saja.

### 3.3.2. Penyaluran Kredit UMKM/Kredit Menurut Skala Usaha

Berdasarkan skala usaha dan besarnya plafond kredit, penyaluran Kredit Kecil (plafon Rp50 juta – Rp500 juta) menyumbang pangsa tertinggi yaitu sebesar 38,31%, atau senilai Rp1,27 triliun dari total penyaluran kredit yang sebesar Rp3,33 triliun. Pencapaian ini menggeser posisi Kredit Mikro (plafon <Rp50 juta) yang sebelumnya mendominasi realisasi kredit, setelah pada triwulan laporan tercatat penyaluran kredit Mikro sebesar Rp1,17 triliun atau pangsa kredit sebesar 35,01%. Secara total, kredit Mikro dan Kecil menyumbang 73,32% penyaluran kredit perbankan Maluku. Hal ini sejalan dengan kondisi sektor usaha di Maluku yang memang masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil. Namun demikian, pangsa kredit kecil yang

mengindikasikan keberhasilan perbankan sebagai agen perekonomian dan telah terjadinya peningkatan skala usaha dari masyarakat. Sementara itu pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kredit Non UMKM (plafon > Rp5 miliar) yang pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 292,84% (y.o.y) dan kemudian disusul Kredit Kecil yang tumbuh sebesar 107,38% (y.o.y).

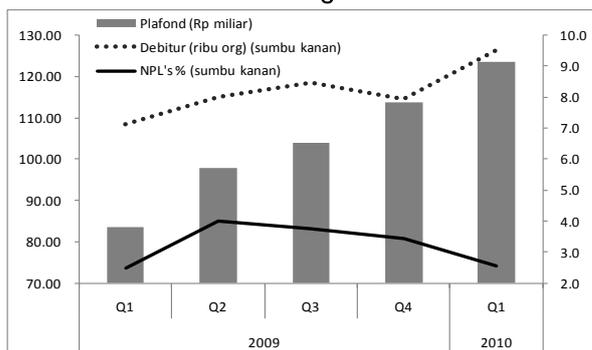
**Grafik 3.3.2.1**  
Perkembangan Kredit Berdasarkan Plafon Kredit



Secara triwulanan (q.t.q), Kredit Kecil dan Kredit Non UMKM mengalami pertumbuhan yang positif, masing-masing tercatat tumbuh sebesar 35,18% dan 191,08%. Secara nominal total realisasi kredit dengan plafon lebih besar dari Rp50 juta pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar Rp584,77 miliar menjadi Rp2,16 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pencapaian kinerja kredit perbankan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan skala usaha, mulai menurunnya persepsi resiko kredit perbankan kepada sektor usaha, serta peningkatan realisasi investasi usaha oleh para pelaku usaha setelah kondisi ekonomi baik nasional maupun global semakin positif.



**Grafik 3.3.2.2**  
**Perkembangan KUR**



Perkembangan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku masih terus menunjukkan tren positif. Sampai dengan triwulan laporan, realisasi KUR tercatat mencapai Rp123,48 miliar yang disalurkan kepada 9.510 orang debitur. Realisasi KUR tersebut secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 47,67% (y.o.y) atau senilai Rp39,86

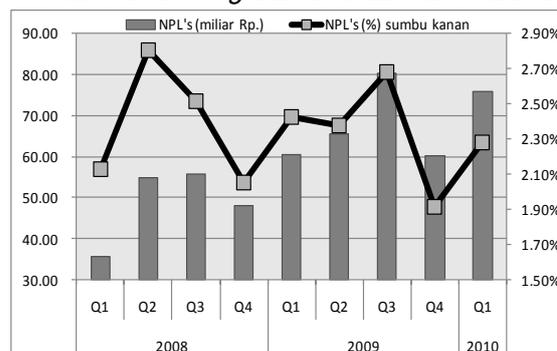
miliar. Secara triwulanan (q.t.q) total KUR meningkat sebesar 8,6% atau setara dengan peningkatan realisasi KUR sebesar Rp9,78 miliar. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut adalah jangkauan pelayanan dari bank penyalur KUR yang masih sangat terbatas, serta dari sisi peraturan. Mulai tahun 2010 akan diberlakukan skema baru dalam penyaluran KUR dimana nasabah yang pernah mendapatkan kredit boleh kembali mengajukan permohonan kredit, serta keikutsertaan Bank Daerah (BPD) untuk menyalurkan KUR diperkirakan dapat mendorong penyaluran KUR menjadi lebih tinggi.

Kinerja positif perbankan dalam hal realisasi KUR tersebut mulai diimbangi dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini tercermin dari angka NPLs KUR yang cenderung menurun dan pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,56% dan lebih rendah dibanding triwulan IV tahun 2009 yang tercatat sebesar 3,42%. Salah satu langkah yang dapat diterapkan guna menjaga kualitas kredit ini adalah dengan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat serta upaya meluruskan anggapan di sebagian masyarakat bahwa KUR adalah bantuan pemerintah.

**3.3.3. Non Performing Loans (NPLs) Bank**

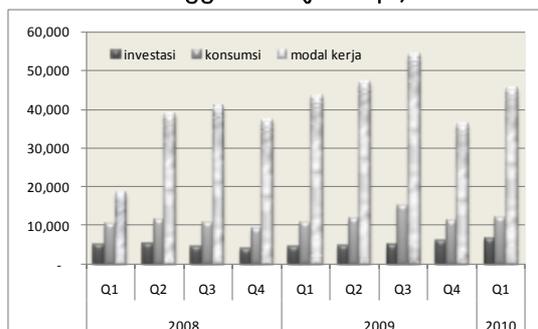
Secara tahunan (y.o.y), NPLs Perbankan Maluku menunjukkan tren perbaikan. NPLs sedikit menurun dari 2,42% pada triwulan I 2009 menjadi 2,28% pada triwulan laporan. Namun apabila dilihat secara triwulanan (q.t.q), NPLs sedikit meningkat dibandingkan posisi triwulan IV 2009 yang tercatat sebesar 1,92%. Secara nominal, NPL's triwulan laporan mencapai Rp76 miliar, meningkat dibandingkan Triwulan I tahun 2009 yang mencapai Rp60,51 miliar maupun posisi triwulan IV 2009 sebesar Rp60,36 miliar.

**Tabel 3.3.3.1**  
**Non Performing Loans Perbankan Maluku**



Sementara itu potensi penurunan kualitas kredit di masa depan masih dimungkinkan terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah kredit yang berkualitas kurang lancar sebesar 18,01% (q.t.q) atau senilai Rp.1,16 miliar serta kredit yang berstatus Dalam Perhatian Khusus yang meningkat sebesar 14,83% atau senilai Rp15,46 miliar.

**Grafik 3.3.3.2**  
**Perkembangan NPLs Berdasarkan Jenis Penggunaan (juta Rp.)**



Berdasarkan jenis penggunaannya, NPLs terbesar disumbangkan oleh Kredit Modal Kerja yang mencapai 71,15% dan kredit konsumsi yang mencapai 18,79% dari total NPLs pada triwulan laporan. Kredit Modal Kerja menjadi penyumbang terbesar karena umumnya kredit ini disalurkan kepada pelaksana proyek-proyek pemerintah dan dunia usaha (UMKM). Faktor yang diperkirakan

menjadi pemicu keterlambatan pencairan dana adalah audit proyek yang masih belum terselesaikan, sehingga dana belum dapat dicairkan. Meskipun kredit konsumsi hanya menjadi penyumbang NPLs terbesar kedua, namun NPLs kredit jenis penggunaan konsumsi meningkat sebesar 9,35% atau Rp1,03 miliar dibandingkan triwulan IV 2009. Kondisi ini perlu disikapi secara serius oleh perbankan mengingat selama ini kredit konsumsi masih menjadi primadona bagi sektor perbankan, karena dipandang resiko kreditnya rendah, namun demikian terdapat potensi menurunnya kualitas kredit seiring dengan meningkatnya resiko kegagalan kredit.

### Boks 3

## MOMENTUM PENINGKATAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI MALUKU

### MELALUI RELAKSASI DAN PENAMBAHAN BANK PENYALUR KUR

#### Addendum II Nota Kesepahaman Bersama

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pertama kali pada tanggal 5 November 2007 dengan tujuan membantu usaha produktif yang layak tetapi belum memenuhi persyaratan bank teknis. Dalam perjalanannya KUR terus mendapatkan evaluasi dari pemerintah, perbankan, dan masyarakat sehingga *Standard Operation Procedure* (SOP) dan ketentuan KUR disesuaikan dengan perkembangan pasar dalam bentuk Addendum Nota Kesepahaman Bersama. Pada tanggal 12 Januari 2010 ditetapkan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang intinya merupakan penyempurnaan relaksasi penyaluran KUR pada Addendum I dengan tujuan meningkatkan akselerasi penyaluran KUR.

Beberapa terobosan yang mempermudah penyaluran KUR pada Addendum II ini antara lain mengenai metode penyaluran, persyaratan debitur, jangka waktu, dan suku bunga. Metode penyaluran KUR dapat secara langsung (*direct*) kepada debitur atau melalui lembaga keuangan (*linkage*). Untuk penyaluran secara *linkage* maka batas atas lembaga keuangan tersebut memperoleh KUR dari perbankan adalah 1 miliar rupiah. Persyaratan bagi calon debitur KUR juga dipermudah. Saat ini calon debitur yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, kredit konsumsi, dan kartu kredit diperbolehkan untuk memperoleh KUR. Kelonggaran ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk mencari calon debitur.

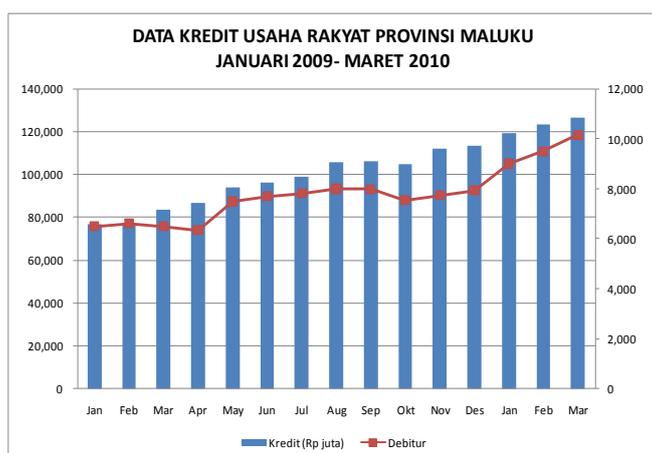
Dari sisi jangka waktu, Addendum II juga memberikan periode pelunasan kredit yang lebih lama. Untuk kredit modal kerja diberikan jangka waktu pelunasan 3 tahun dengan jangka waktu maksimal sampai 6 tahun jika kredit mengalami perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi. Sedangkan untuk kredit investasi, jangka waktu yang diberikan adalah 5 tahun dengan jangka waktu maksimal selama 10 tahun untuk kredit yang mengalami perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi.

Addendum II juga memberikan relaksasi pada tingkat suku bunga berdasarkan plafon. Untuk plafon Rp0-5 juta suku bunga disesuaikan dari 24% menjadi maksimal 22% per tahun. Selanjutnya plafon Rp0-5 juta ini disebut KUR mikro yang memiliki kemudahan tidak perlu pengecekan pada sistem Informasi Debitur (SID). Sedangkan untuk plafon Rp5-500 juta suku bunga disesuaikan dari 16% menjadi maksimal 14% per tahun.

### Penambahan Jumlah Bank Penyalur

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor:Kep-07/M.Ekon/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat maka terjadi penambahan bank penyalur KUR. Jika pada awalnya KUR hanya disalurkan oleh BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin maka terhitung sejak 26 Januari 2010 bank penyalur KUR semakin banyak dengan masuknya PT Bank DKI, PT Bank Nagari, PT Bank Jabar Banten, PT Bank Jateng, BPD DIY, PT Bank Jatim, PT Bank NTB, PT Bank Kalbar, BPD Kalsel, PT Bank Kalteng, PT Bank Sulut, PT Bank Maluku, dan PT Bank Papua. Hal ini tentu saja membuka peluang lebih besar bagi akselerasi penyaluran KUR kepada masyarakat guna membiayai usaha produktif. Lagipula jika dilihat lebih jauh ketiga belas bank tersebut merupakan bank daerah sehingga diharapkan memiliki perhatian lebih terhadap peningkatan kegiatan ekonomi daerah melalui penyaluran KUR.

### Kondisi dan Potensi Penyaluran KUR di Maluku



Sampai dengan akhir Maret 2010 penyaluran KUR di Maluku mencapai Rp126.913.200.000,00 dengan 10.169 debitur. Jika dilihat secara sektoral komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (76,32%), sektor jasa dunia usaha (9,78%), serta sektor pertanian & perikanan (7,26%).



Maluku merupakan provinsi kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Jika melihat fakta bahwa sektor pertanian & perikanan hanya memperoleh kucuran KUR sebesar 7,26% maka hal ini perlu dicarikan solusinya antara lain melalui sertifikasi tanah nelayan dan proses pengurusan izin satu atap. Karena ke depan, seiring dengan penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, pengoptimalan potensi kelautan tersebut diharapkan dapat ditingkatkan melalui penyaluran KUR ke usaha-usaha berbasis kelautan. Salah satu komoditas unggulan yang menjadi sasaran pemerintah provinsi adalah rumput laut. Komoditas bernilai jual tinggi ini relatif mudah dikembangkan oleh masyarakat pembudidaya dengan modal yang tidak terlalu besar. Dengan modal Rp5 juta saja usaha budidaya rumput laut sudah dapat berjalan. Jika melihat target penyaluran KUR PT Bank Maluku sebesar Rp15 miliar untuk tahun 2010 dengan asumsi disalurkan dalam bentuk kredit 5 juta-an maka target ini dapat disalurkan untuk 3000 pembudidaya rumput laut.

Pentingnya peningkatan produksi rumput laut di Provinsi Maluku salah satunya untuk memasok bahan baku pabrik rumput laut yang akan dibangun di enam titik Maluku. Peningkatan produksi rumput laut untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan akan memberikan peluang penyediaan lapangan kerja dan peluang peningkatan penghasilan bagi masyarakat. PT Bank Maluku sendiri memiliki target penyaluran KUR sebesar Rp15 miliar untuk tahun 2010.

Momentum relaksasi KUR melalui Addendum II Nota Kesepahaman Bersama, penambahan bank penyalur, penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, peningkatan produksi rumput laut, dan pembangunan pabrik rumput laut harus dimanfaatkan dengan tepat melalui peningkatan penyaluran KUR dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM di Provinsi Maluku.

---

## BAB IV SISTEM PEMBAYARAN

---

Sebagai perwujudan salah satu tugas pokok Bank Sentral yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Kantor Bank Indonesia (KBI) Ambon menyelenggarakan kegiatan Sistem Pembayaran (SP) baik tunai, yang tercermin dari aktivitas *inflow dan outflow* melalui kas Bank Indonesia Ambon, maupun non tunai yang tercermin dari aktivitas kliring dan *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

Pada triwulan laporan, aktivitas SP Tunai mulai kembali pada karakteristik yang biasa terjadi di awal tahun yaitu sebagai KBI *Net inflow*. Sementara itu untuk kinerja SP Non Tunai, yang tercermin dari RTGS, pada triwulan laporan tercatat mengalami *Net Incoming*.

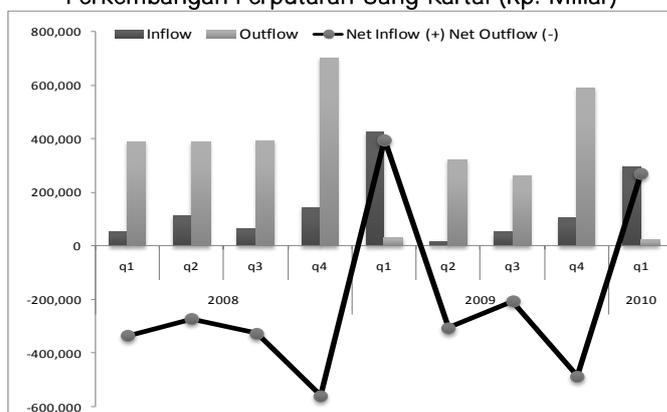
### 4.1. Pembayaran Tunai

Seperti pola historisnya yang terjadi selama ini, aliran uang kartal di kas KBI Ambon pada triwulan I 2010 berada dalam kondisi *net inflow* yang berarti aliran uang kartal masuk ke BI Ambon lebih besar dari uang kartal keluar. Terjadinya *net inflow* sebesar Rp270,18 miliar terutama dipicu oleh adanya kebijakan BI untuk menerima setoran Uang Layak Edar (ULE) dari Perbankan (Diskresi) pasca hari raya keagamaan dan Tahun Baru. Hal yang sama juga terjadi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Pada triwulan laporan data *inflow* tercatat sebesar Rp294,45 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan data *outflow* yang tercatat sebesar Rp24,27 miliar sehingga pada triwulan laporan posisi kas BI terjadi *net inflow* sebesar Rp270,18 miliar. Data *inflow* yang terjadi pada triwulan laporan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan data *inflow* yang terjadi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp103,19 miliar, namun data *inflow* tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat *inflow* sebesar Rp426,97 miliar atau turun sebesar 31,04%(y.o.y). Kondisi ini, tidak jauh berbeda dengan kinerja tahun sebelumnya yang pada triwulan yang sama posisi kas BI juga mengalami *net inflow* sebesar Rp396,99 miliar yang diperoleh dari selisih antara *inflow* sebesar Rp426,97 miliar dan *outflow* sebesar Rp29,97 miliar.

Selain faktor siklus yang selama ini rutin terjadi, faktor dominan yang diperkirakan mendorong terjadinya *net inflow* tersebut antara lain terkait penyetoran uang tidak layak edar dari Perbankan ke kas BI.

Grafik 4.1.1.  
Perkembangan Perputaran Uang Kartal (Rp. Miliar)



sumber: Bank Indonesia Ambon

Posisi persediaan Kas KBI Ambon pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar 286,32 miliar atau meningkat sebesar 19,56% dibanding triwulan sebelumnya yang mencatat persediaan sebesar Rp239,48 miliar. Sementara secara tahunan (y.o.y) tercatat sebesar Rp628,72 miliar atau menurun sebesar 54,46%.

#### 4.1.1. *Inflow* (Uang Masuk)

Jumlah *inflow* ke Bank Indonesia Ambon selama triwulan I 2010 tercatat sebesar Rp294,45 miliar atau meningkat sebesar 185,35% dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp103,19 miliar namun demikian secara tahunan (y.o.y) menurun sebesar 31,04%. Peningkatan ini terkait dengan meningkatnya aktivitas jumlah setoran, baik berupa Uang Layak Edar (ULE) maupun Uang Tidak Layak Edar (UTLE), dari perbankan akibat adanya kebijakan diskresi pada awal tahun pasca perayaan hari raya Natal 2009 dan tahun baru 2010.

#### 4.1.2. *Outflow* (Uang Keluar)

Sesuai dengan siklus yang terjadi, jumlah *outflow* dari Bank Indonesia Ambon selama triwulan I 2010 tercatat sebesar Rp24,27 miliar atau mengalami penurunan sebesar 95,89% dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp590,07 miliar. Secara tahunan (y.o.y) *outflow* juga mengalami penurunan sebesar 19,02% dibandingkan triwulan yang sama tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp29,97 miliar. Relatif menurunnya *outflow* ini diperkirakan karena persediaan kas di perbankan Maluku masih memenuhi kebutuhan masyarakat dan tren meningkatnya transaksi dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).

---

#### 4.1.3. PTTB (Pemberian Tanda Tidak Berharga)

Dari jumlah uang masuk ke Bank Indonesia Ambon (*inflow*) pada triwulan I 2010 sebesar Rp294,45 miliar, jumlah uang yang diklasifikasikan sebagai UTLE dan diberi tanda tidak berharga sebesar Rp145,04 miliar atau naik sebesar 340,81%.

Secara triwulanan (q.t.q) kegiatan PTTB mengalami peningkatan sebesar 340,81% dibanding triwulan lalu. Sementara itu secara tahunan, PTTB pada triwulan I 2010 meningkat sebesar 534%(y.o.y) dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp22,88 miliar. Peningkatan ini merupakan kondisi yang wajar seiring dengan terjadinya peningkatan *inflow* serta upaya mengedepankan prinsip *clean money policy*.

Sampai dengan triwulan laporan kegiatan Kas Keliling luar kota Ambon telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dalam kota sebanyak 4 (empat) kali. Fokus dari kegiatan ini adalah tersedianya uang beredar di masyarakat dalam kondisi yang layak edar. Sedangkan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada masyarakat, selama triwulan I 2010 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan II 2010.

#### 4.1.4. Pembayaran Non Tunai

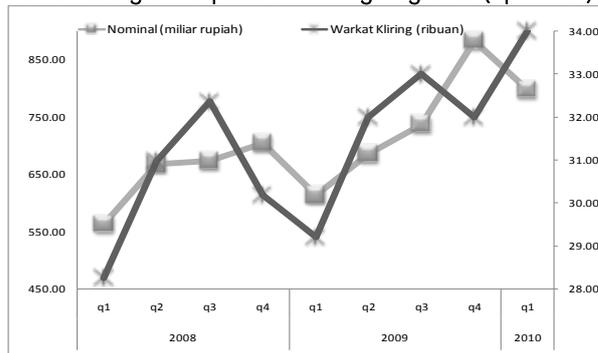
Sejalan dengan aktivitas SP Tunai di atas, kegiatan SP non Tunai yang direpresentasikan oleh aktivitas transaksi kliring dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) bervariasi. Untuk transaksi kliring jumlah warkat mengalami peningkatan sedangkan jumlah nominal mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya dan untuk *Real Time Gross Settlement* (RTGS) baik *incoming* maupun *outgoing* juga mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

#### 4.1.5. Kegiatan Kliring

Pada triwulan laporan, pertukaran warkat kliring yang diikuti oleh 14 bank peserta termasuk Bank Indonesia, mencatat nominal sebesar Rp798 miliar dengan jumlah warkat mencapai sebanyak 34 ribu lembar. Secara triwulanan (q.t.q) nominal kliring menurun sebesar 9,63% sedangkan jumlah warkat meningkat sebesar 6,25% dan secara tahunan (y.o.y) jumlah nominal meningkat sebesar 30,15% sedangkan untuk jumlah warkat kliring meningkat sebesar 16,42%. Secara harian, jumlah nominal perputaran kliring mencatat sebesar Rp41 miliar atau menurun 6,38% sedangkan jumlah warkat tidak mengalami perubahan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 2 ribu lembar namun secara tahunan (y.o.y) jumlah nominal meningkat sebesar 34,75% dari nominal kliring sebelumnya yang tercatat sebesar Rp31 miliar.



**Grafik 4.2.1.**  
**Perkembangan Perputaran Kliring Regional (Rp Miliar)**



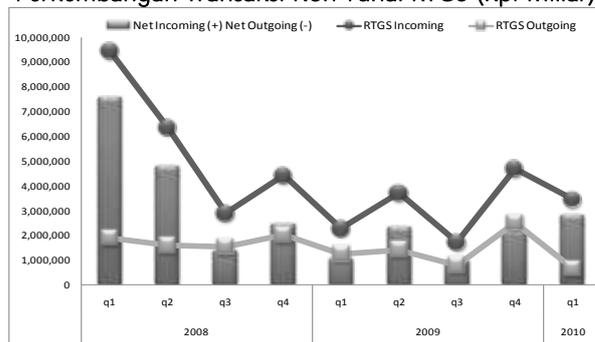
sumber: Bank Indonesia Ambon

Persentase Penolakan cek/bilyet giro kosong tidak mengalami perubahan jumlah nominalnya sedangkan jumlah warkat sama dibanding triwulan lalu. Jumlah penolakan warkat kliring pada triwulan laporan menurun sebesar 42,48% sedangkan nominalnya menurun 23,10% dibanding triwulan sebelumnya.

Secara tahunan jumlah nominal menurun sebesar 26,09% sedangkan jumlah penggunaan warkat meningkat sebesar 32,54%. Penurunan jumlah penolakan warkat kliring disebabkan masyarakat semakin memahami syarat-syarat berlakunya penggunaan warkat yang benar.

#### 4.1.6. Transaksi BI RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

**Grafik 4.2.2.**  
**Perkembangan Transaksi Non Tunai RTGS (Rp. Miliar)**



sumber: Bank Indonesia Ambon

Dalam triwulan laporan, *Real Time Gross Settlement (RTGS) incoming* tercatat sebesar Rp3,43 triliun dan *outgoing* sebesar Rp649 miliar, mengalami penurunan masing-masing sebesar 26,90% dan 74,13% dibanding triwulan sebelumnya. Secara tahunan, terjadi peningkatan *incoming* sebesar 51,45% dan penurunan *outgoing*

sebesar 47,03%. Penurunan nilai *incoming* maupun *outgoing* pada triwulan laporan, terkait dengan belum terealisasinya anggaran proyek secara optimal dan perputaran uang masih terkonsentrasi di wilayah Maluku untuk kegiatan pembiayaan aktivitas rutin.

Kondisi *net incoming* pada triwulan laporan juga terjadi pada triwulan sebelumnya namun lebih tinggi dibanding triwulan laporan. *Net incoming* pada triwulan lalu tercatat sebesar Rp2,18 triliun dan pada triwulan laporan sebesar Rp2,78 triliun atau meningkat sebesar 27,60% dibanding triwulan lalu dan meningkat sebesar 168,01% bila dibanding dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Banyak dana yang mengalir ke Maluku (*net incoming*) pada awal tahun diperkirakan merupakan gelontoran dana DIPA APBN yang akan digunakan sebagai stimulus pembangunan di daerah.

## BAB V PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

### 5.1. Realisasi APBN di Provinsi Maluku

Anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Maluku yang berasal dari dana APBN pada tahun 2010 menurun sebesar 14,11% dibandingkan anggaran tahun 2009. Penurunan tersebut terutama terjadi pada pos belanja lain-lain yang turun sampai dengan 93,88% atau menjadi senilai Rp19,14 miliar dibandingkan anggaran tahun 2009 yang mencapai Rp312,94 miliar. Penurunan tersebut diperkirakan terkait dengan telah selesainya agenda pemerintah pusat baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Presiden yang diakomodir di pos belanja ini. Demikian juga pos-pos belanja pemerintah daerah yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur daerah, seperti Belanja Modal dan Belanja Barang juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,03% dan 14,09%. Sementara itu pos Belanja Pegawai menjadi satu-satunya pos anggaran yang mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2010 yaitu meningkat sebesar 16,19% atau senilai Rp152,15 miliar dibandingkan pagu anggaran tahun 2009.

Tabel 5.1.1

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Anggaran tahun 2010 yang dibiayai dari APBN

No	Jenis belanja	Anggaran tahun 2009	Pagu Anggaran tahun 2010	% Realisasi TW I 2010	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	939,572,178,000	1,091,724,703,000	29,22%	772,728,574,969
2	Belanja Barang	972,701,678,500	835,222,360,000	13,88%	719,267,194,694
3	Belanja Modal	1,169,463,341,000	1,052,123,090,000	12,99%	915,403,398,596
4	Belanja Bantuan Sosial	598,477,377,000	431,049,162,000	18,88%	349,653,811,000
5	Belanja Lain-Lain	312,940,797,000	19,143,363,000	20,21%	15,275,161,751
	<b>Jumlah</b>	<b>3,992,655,371,500</b>	<b>3,429,262,678,000</b>	<b>19,16%</b>	<b>2,772,325,050,910</b>

\* data : *Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku*

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2010, realisasi anggaran yang dibiayai APBN tersebut masih relatif lambat. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang secara total baru mencapai 19,16% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran terbesar berasal dari pos belanja pegawai yang telah mencapai 29,22% dari pagu anggaran dan disusul oleh realisasi belanja lain-lain yang mencapai 20,21%. Realisasi belanja lain-lain yang cukup tinggi ini diperkirakan berkaitan dengan persiapan kegiatan *Sai/Banda* 2010.

Realisasi anggaran belanja barang Pemda yang masih sebesar 13,88% atau senilai Rp115,96 miliar menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) relatif masih



.....  
belum merealisasikan program kerjanya. Hal ini juga terkait dengan masih belum disetujuinya RAPBD Pemda Maluku sehingga proyek/kegiatan belum dapat dilakukan tender pengadaan. Penundaan realisasi pengadaan belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan *multiplier effect* dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat belum optimal.

Realisasi belanja modal sampai triwulan laporan baru mencapai 12,99% atau senilai Rp136,72 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1,05 triliun. Penyerapan pada pos belanja modal yang masih rendah ini dipengaruhi oleh belum direalisasikannya proyek-proyek Pemda terkait dengan belum disetujuinya APBD Maluku tahun 2010 serta masih belum selesainya proses tender proyek di beberapa SKPD di lingkup Pemda Maluku.

Relatif rendahnya pagu anggaran pada pos belanja barang juga perlu diperhatikan dalam realisasinya agar tidak terjadi penggunaan yang tidak tepat. Hal ini mengingat pos biaya perjalanan dinas juga termasuk dalam pos belanja barang ini.

Realisasi belanja bantuan sosial (Bansos) mencapai 18,88% atau sebesar Rp81,39 miliar dari pagu anggaran tahun 2010 yang sebesar Rp431,05 miliar. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa program-program bantuan komunal telah mulai terealisasi di triwulan laporan. Realisasi anggaran pada pos belanja Bantuan Sosial maka perlu adanya suatu terobosan program pemberdayaan yang tepat sasaran/dapat menjangkau lebih banyak masyarakat guna mengefektifkan penyerapan anggaran.

Pencapaian realisasi pada jenis belanja lain-lain telah mencapai 20,21% atau sebesar Rp3,87 miliar dari pagu sebesar Rp19,14 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pos ini mulai terlihat seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan *Sai//Banda* 2010.

## Boks 4

### PERAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR (LPDB) DAERAH DALAM PERMODALAN USAHA KOPERASI DAN USAHA KECIL DI MALUKU

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PDB-KUMKM) Daerah dan telah disahkan melalui PERDA No 09 Tahun 2009 tentang *Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UPTD PDB-UMKM) Daerah, tanggal 14 September 2009.*

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di Provinsi Maluku untuk mengakses sumber pendanaan diluar perbankan diperlukan pemberian pinjaman kepada KUMKM melalui UPTD PDB Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penyalur dana bergulir yang diatur pengelolaan dan penggunaannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku PERDA Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 14 September 2009.*

Sumber pendanaan untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Daerah berasal dari APBD Daerah, dimana LPDB Daerah yang telah disahkan dengan PERDA ini belum dapat melakukan pembiayaan kepada Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) karena sementara proses ijin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari Gubernur Maluku. Ijinnya sementara dalam proses.

Selama ini pendanaan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dibiayai melalui LPDB Pusat dimana pada tahun 2009 telah direalisasikan sebanyak 3 Miliar kepada 3 koperasi masing – masing : *2 Koperasi di Kabupaten Maluku Tengah dengan nilai dana bergulir 1 Koperasi 1 Milliar dan 1 Koperasi 500 juta, sementara di Kota Ambon 1 koperasi sebesar 1,5 Milliar.*

Sampai dengan tahun 2010 permohonan yang masuk ke UPTD LPDB Daerah sebanyak kurang lebih 400 permohonan. Dengan banyaknya permohonan yang masuk ke LPDB Daerah merupakan potensi pembiayaan baik oleh pihak LPDB pusat maupun Daerah juga kepada lembaga perbankan karena selama ini perbankan kesulitan untuk mendapatkan Koperasi yang layak untuk dibiayai oleh perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Alur Proses Dana Bergulir, semua permohonan yang masuk akan diseleksi oleh TIM dari LPDB Daerah dengan tujuan pendanaan, apabila Koperasi atau UMKM dipandang layak akan diajukan ke LPDB Pusat dan LPDB daerah serta akan dipersiapkan untuk diajukan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kehadiran UPTD LPDB Daerah dapat mengatasi masalah permodalan yang selama ini dihadapi oleh Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (K-UMKM) karena dengan teratasinya masalah permodalan maka akan menggerakkan usaha dari Koperasi dan pelaku UMKM tersebut yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga.

Penyaluran dana bergulir melalui UPTD-LPDB, diharapkan dapat meningkatkan usaha pelaku UMKM dengan mengalami perubahan pola perilaku UMKM yang terbiasa dengan sistem bantuan ke sistem kredit yang dikelola oleh LPDB sehingga akan meningkatkan kualitas usaha dari Koperasi dan pelaku UMKM itu sendiri. Dengan sendirinya apabila terjadi perubahan pola perilaku maka akan juga terjadi perubahan kualitas usaha.

Salah satu tugas pokok UPTD PDB-KUMKM Daerah adalah melaksanakan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Peningkatan Permodalan dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Perekonomian Daerah. UPTD PDB-KUMKM daerah dalam meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menitik beratkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktifitas atau kelayakan usaha.

Fungsi UPTD PDB-UMKM adalah pelaksanaan penghimpunan, penyaluran dan pengembalian dana bergulir yang berasal dari LPDB-KUMKM Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan atau anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Maluku serta sumber dana lainnya.

## BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 6.1. Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Propinsi Maluku menunjukkan tren yang terus meningkat. Sampai bulan Agustus 2009, jumlah penduduk usia kerja mencapai 910,844 orang atau mengalami pertambahan sebanyak 0.78% dibandingkan pada bulan Februari 2009 yang sebanyak 903,826 orang. Pertambahan angkatan kerja tersebut dapat diimbangi oleh kondisi usaha daerah yang mulai menunjukkan pertanda membaik yang tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65,44%, atau 596,030 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Propinsi Maluku tersedia tenaga kerja dalam jumlah yang cukup memadai.

Tabel 6.1.1  
Tabel Ketenagakerjaan 2006-2009

Jenis Kegiatan	2006		2007		2008		2009	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Bekerja	414.470	451.988	455.337	485.308	493.117	499.555	528.509	533.015
Pengangguran	77.555	71.854	78.443	67.421	61.231	59.684	61.194	63.015
Angkatan Kerja	492.025	523.842	531.780	552.729	554.348	559.239	589.703	596.030
Bukan Angkatan Kerja	332.731	335.558	335.737	324.522	316.714	330.978	314.123	314.814
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15,76%	13,72%	14,37%	12,20%	11,05%	10,67%	10,38%	10,57%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,66%	60,95%	61,30%	63,01%	63,64%	62,82%	65,25%	65,44%
Penduduk Usia Kerja (> 15 tahun)	824.756	859.400	867.517	877.251	871.062	890.217	903.826	910.844

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja mengalami

sedikit peningkatan dari 65,25% pada bulan Februari 2009 menjadi 65,44% pada Agustus 2009. Sementara itu Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (PTK), yang merupakan rasio antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, mengalami sedikit peningkatan 10,38% pada Februari 2009 menjadi 10,57% pada Agustus 2009. Dari kondisi ini dapat dinyatakan bahwa arah perbaikan ekonomi belum dapat diimbangi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan, hal ini dikarenakan secara nasional maupun regional kondisi perekonomian memang masih dalam tahap pemulihan.

**Tabel 6.1.2**  
Tabel Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	2007			2008			2009		
	Februari	Agustus	%	Februari	Agustus	%	Februari	Agustus	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	277.637	292.628	58,89	317.914	294.187	58,89	314.175	299.995	56,28
Pertambangan & Penggalian	2.618	3.193	0,62	3.844	3.115	0,62	6.108	2.285	0,43
Industri	17.897	20.757	5,27	10.109	26.341	5,27	15.834	34.569	6,49
Listrik, Gas & Air Minum	2.358	908	0,27	941	1.331	0,27	759	1.367	0,26
Konstruksi	16.704	16.358	3,47	17.204	17.345	3,47	21.359	23.971	4,50
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	57.038	60.352	11,56	48.949	57.743	11,56	63.453	67.323	12,63
Transportasi, Pergudangan & Komunikasi	29.449	28.287	6,54	33.621	32.660	6,54	33.245	29.998	5,06
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	1.196	2.848	0,36	1.357	1.801	0,36	2.872	4.196	0,79
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	50.438	59.877	13,02	59.178	65.032	13,02	70.604	72.313	13,57
<b>Total</b>	<b>455.337</b>	<b>485.308</b>	<b>100,00</b>	<b>493.117</b>	<b>499.555</b>	<b>100,00</b>	<b>528.509</b>	<b>533.015</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

sebagai kondisi usaha yang mulai menunjukkan arah perbaikan ekonomi juga tercermin dari mulai terserapnya tenaga kerja ke sektor-sektor ekonomi formal maupun proyek pekerjaan padat karya seperti di sektor Industri, sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi serta sektor Konstruksi. Sektor Industri mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 118,32% atau menjadi 34.569 orang pada bulan Agustus 2009 dari 15.834 orang pada bulan Februari 2009. Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi meningkat sebesar 6,10% atau sebanyak 3.870 orang menjadi 67.323 orang tenaga kerja pada bulan Agustus 2009. Sementara pada sektor Konstruksi terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.612 orang tenaga kerja, atau sebesar 12,23%, sehingga menjadi 23.971 orang tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi tersebut berdampak terhadap berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan yang telah mengalami peningkatan selama periode krisis global.

**Tabel 6.1.3**  
Tabel Status Pekerjaan menurut Wilayah Tempat Tinggal

Wilayah	2008						2009					
	Februari			Agustus			Februari			Agustus		
	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran (%)									
Perkotaan	141.589	124.153	12,31	155.428	129.442	16,72	158.242	131.969	16,60	161.501	135.674	15,99
Perdesaan	412.759	368.964	10,61	403.811	370.113	8,34	431.461	396.540	8,09	434.529	397.341	8,56
Kota + Desa	554.348	493.117	14,37	559.239	499.555	10,67	589.703	528.509	10,38	596.030	533.015	10,57

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di masyarakat perdesaan mengalami peningkatan sebesar 6,49% atau 2.267 orang dibandingkan bulan Februari 2009, sehingga jumlah pengangguran per bulan Agustus 2009 menjadi 37.188 orang. Sementara di perkotaan terjadi penurunan jumlah pengangguran sebanyak 446 orang atau sebesar 1,70% menjadi 25.827 orang selama periode bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009. Kondisi pengangguran di kawasan perdesaan yang meningkat ini sejalan dengan perkembangan tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi dimana perkembangan terjadi di sektor-sektor ekonomi yang berada di kawasan perkotaan. Secara

total, tingkat pengangguran sedikit meningkat dari 10,38% pada bulan Februari 2009 menjadi 10,57% pada bulan Agustus 2009.

**Tabel 6.1.4**  
**Tabel Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Agustus 2008			Agustus 2009		
	Angkatan Kerja	Bekerja	%	Angkatan Kerja	Bekerja	%
Laki-laki	355,709	224,955	63.24	363,727	332,386	91.38
Perempuan	203,530	174,600	85.79	232,303	200,629	86.37
<b>Total</b>	<b>559,239</b>	<b>399,555</b>	<b>71.45</b>	<b>596,030</b>	<b>533,015</b>	<b>89.43</b>

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

Dilihat dari jenis kelamin, maka tingkat pengangguran di Provinsi Maluku ini lebih besar berada pada perempuan. Peningkatan persentase yang cukup signifikan terjadi pada tenaga kerja laki-laki, per Agustus 2009 terjadi peningkatan sebesar 28,14% menjadi 91,38% dibandingkan periode Agustus 2008. Hal ini sejalan dengan kondisi penyerapan tenaga kerja sektoral dimana sektor-sektor yang dominan menyerap tenaga kerja merupakan sektor yang padat karya, bersifat proyek dan *un-skilled* seperti sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Perburuan dan Perikanan, sektor Konstruksi serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Secara umum memang ketersediaan lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan relatif lebih terbatas dibanding untuk kaum laki-laki.

**Tabel 6.1.5**  
**Tabel Persentase Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota**

Kabupaten/Kota	Agustus 2008				Agustus 2009			
	Angkatan Kerja	Bekerja	TPT (%)	TPAK (%)	Angkatan Kerja	Bekerja	TPT (%)	TPAK (%)
Maluku Tenggara Barat	75,757	71,362	5.80	69.64	80,537	75,023	6.85	73.08
Maluku Tenggara	59,594	54,947	7.80	62.55	49,087	44,904	8.52	73.06
Maluku Tengah	129,485	113,638	12.24	59.51	133,805	117,206	12.41	60.89
Buru	57,586	51,728	10.17	65.85	65,499	61,142	6.65	72.58
Kepulauan Aru	32,507	30,604	5.85	62.62	34,319	32,414	5.55	64.88
Seram Bagian Barat	67,556	60,399	10.59	69.89	70,235	64,556	8.09	71.76
Seram Bagian Timur	32,687	30,123	7.84	58.76	37,035	33,872	8.54	65.67
Ambon	104,067	86,664	16.72	58.83	105,513	86,979	17.57	57.10
Tual					20,000	16,919	15.41	63.48
Provinsi Maluku	559,239	499,465	10.67	62.82	596,030	533,015	10.57	65.44

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

Dari sisi wilayah pemerintahan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi berada di Kota Ambon yaitu sebesar 17,57% dan yang paling rendah berada di Kabupaten Kep. Aru yang tercatat sebesar 5,55%. Tingginya TPT Kota Ambon juga sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ambon yang tercatat hanya sebesar 57,1% dan terendah di antara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Sementara itu 3 (tiga) kabupaten/kota dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu sebesar 73,08%, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 73,06% dan Kabupaten Buru sebesar 72,58%. Dari besaran angka-angka tersebut terlihat bahwa jumlah lapangan kerja yang selama ini tersentralisasi di Kota Ambon mulai mengalami pergeseran. Terlihat juga bahwa pemekaran wilayah baru di tahun sebelumnya mampu memberi dampak positif dengan penciptaan lapangan kerja baru, baik yang terkait dengan realisasi proyek pemerintah ataupun investasi swasta di daerah hasil pemekaran.

Tabel 6.1.6  
Tabel Penduduk Usia Kerja yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan	2007				2008				2009			
	Februari		Agustus		Februari		Agustus		Februari		Agustus	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Berusaha Sendiri	139.188	30,57	121,363	25,01	168.706	34,21	138,309	27,69	131.586	24,90	126,753	23,78
Berusaha dibantu buruh tidak teta	103.587	22,75	119,272	24,58	104.061	21,10	120,982	24,22	137.052	25,93	121,567	22,81
Berusaha dibantu buruh tetap	13.462	2,96	11,473	2,36	8.928	1,81	11,355	2,27	10.185	1,93	11,930	2,24
Buruh/karyawan	86.852	19,07	98,308	20,26	89.619	18,17	100,633	20,14	101.98	19,30	107,872	20,24
Pekerja bebas di pertanian	2.535	0,56	10,627	2,19	10.172	2,06	6,578	1,32	5.608	1,06	2,444	0,46
Pekerja bebas di non pertanian	4.263	0,94	7,509	1,55	5.561	1,13	5,295	1,06	9.265	1,75	6,224	1,17
Pekerja tak dibayar	105.45	23,16	116,756	24,06	106.07	21,51	116,406	23,30	132.833	25,13	156,225	29,31
<b>TOTAL</b>	<b>455.337</b>	<b>100,00</b>	<b>485,308</b>	<b>100,00</b>	<b>493.117</b>	<b>100,00</b>	<b>499,558</b>	<b>100,00</b>	<b>528.509</b>	<b>100,00</b>	<b>533,015</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah (data per Agustus 2009)

Tren adanya peningkatan pekerja dengan status Pekerja Tidak Dibayar yang mulai terjadi semenjak Februari 2008 masih terus berlanjut. Per Agustus 2009 tercatat terdapat 156.225 orang berstatus Pekerja Tidak Dibayar, meningkat sebanyak 39.819 orang atau 34,21% dibandingkan periode Agustus 2008. Meningkatnya jumlah Pekerja Tidak Dibayar ini mengindikasikan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan lapangan kerja yang sesuai keahlian atau masih bekerja serabutan sekedar mengisi waktu. Kondisi ini juga terkait dengan posisi jumlah tenaga kerja yang tinggal di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan, dimana kultur pedesaan akan mendorong orang untuk bekerja apa saja karena malu kalau menganggur.

## 6.2. Tingkat Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat Propinsi Maluku terus menunjukkan tren membaik. Hal ini terlihat dari penurunan persentase penduduk miskin yang sejak tahun 2006 terus berlangsung. Penurunan penduduk miskin ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Tabel 6.2.1.  
Tabel Kemiskinan Propinsi Maluku 2006 – 2009

Indikator	2006	2007	2008	2009
<b>Jumlah Penduduk MiskIn (Po)</b>				
Kota	46,200	49,100	44,700	38,770
Desa	372,400	355,600	346,600	341,240
Kota+Desa	418,600	404,700	391,300	380,010
<b>Persentase Penduduk MiskIn</b>				
Kota	13.86%	14.49%	12.97%	11.03%
Desa	39.87%	37.02%	35.56%	34.30%
Kota+Desa	33.03%	31.14%	29.66%	28.23%
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b>				
Kota	2.09	2.49	1.7	1.75
Desa	9.73	7.79	7.37	6.94
Kota+Desa	7.51	6.41	5.89	5.59
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b>				
Kota	0.6	0.61	0.4	0.38
Desa	3.42	2.29	2.23	2.12
Kota+Desa	2.6	1.85	1.75	1.67

Sumber : BPS Propinsi Maluku, diolah

pwilayah perkotaan semakin mendekati ambang batas kemiskinan.

Jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama periode 2008-2009, P1 Propinsi turun dari 5.89 menjadi 5.59, namun demikian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota mengalami sedikit peningkatan, dari 1.7 menjadi 1.75. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat miskin di



.....

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi menunjukkan terjadinya penurunan dari 1.75 pada tahun 2008 menjadi 1.67 pada tahun 2009. Penurunan P2 Desa yang lebih besar daripada penurunan P2 Kota mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih cepat daripada masyarakat kota. Hal ini dapat dilihat sebagai gejala yang baik, karena dapat dikatakan terdapat titik-titik tumbuh ekonomi baru di pedesaan sehingga dapat mencegah semakin tingginya urbanisasi.



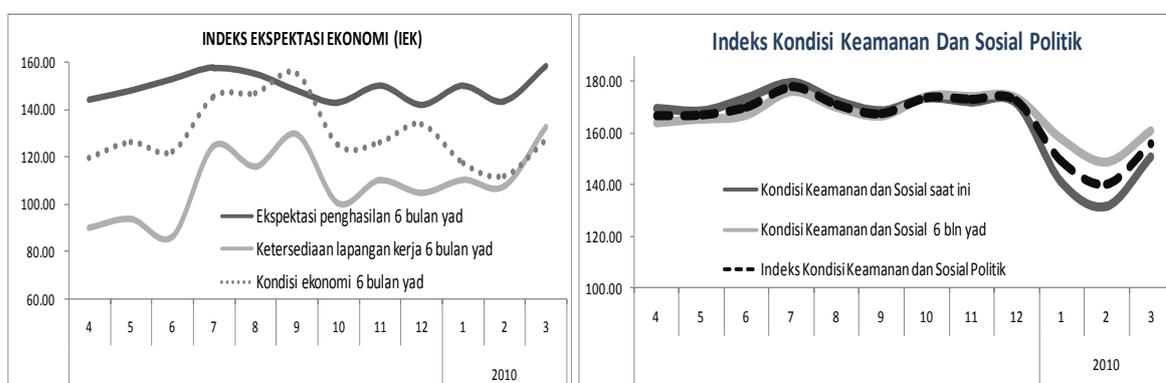
*halaman ini sengaja dikosongkan*

## BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II tahun 2010 diproyeksikan akan tumbuh positif pada kisaran 5,5%-6,0%. Dari sisi permintaan pertumbuhan masih didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan ekpektasi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan ini didorong oleh kenaikan penghasilan masyarakat seiring dengan diberlakukannya UMP Provinsi Maluku tahun 2010 yang meningkat 8,4% dibandingkan tahun 2009 serta kondisi panen tabama yang diperkirakan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Disamping itu juga terdapat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat seiring dengan persiapan event berskala internasional *Sail* Banda 2010. Dari sisi investasi diperkirakan akan didorong oleh persiapan penyelenggaraan even internasional *Sail* Banda 2010, realisasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah pemekaran serta komitmen investasi dari investor asing dan dalam negeri sebagai tindak lanjut kegiatan Maluku Investment Day 2010.

Seiring dengan meningkatnya permintaan dari sisi penawaran, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II 2010 diprakirakan masih berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor pertanian serta sektor industri pengolahan. Pada sektor PHR pertumbuhan terutama didorong oleh telah beroperasinya hotel yang memiliki jaringan internasional di kota Ambon seperti Swissbel Hotel dan Amaris Santika Hotel. Sementara pendorong pertumbuhan pada sektor Angkutan dan komunikasi berasal dari rencana dibukanya rute penerbangan Jakarta-Makassar-Ambon oleh maskapai nasional serta rute penerbangan di dalam provinsi.

Grafik 6.1  
Perkembangan Indeks Ekspektasi Masyarakat

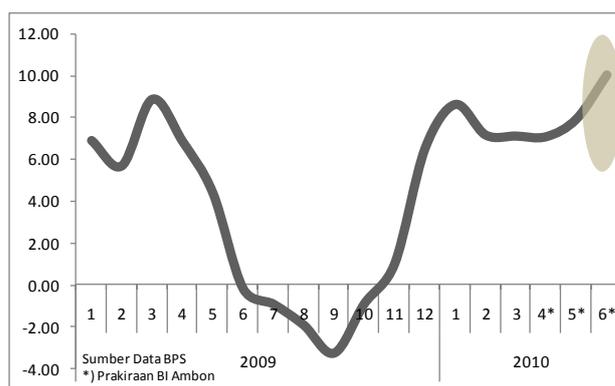


Peningkatan pertumbuhan ini didukung oleh optimisme keyakinan para pelaku usaha terhadap ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang akan datang dan kondisi keamanan dan sosial politik yang cenderung membaik sebagaimana ditunjukkan

dari indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi keamanan dan sosial politik hasil Survei Konsumen bulan Desember 2009.

Perkembangan harga-harga secara umum pada akhir triwulan II 2009 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (q.t.q) dan diproyeksikan secara tahunan pada kisaran  $9\% \pm 1\%$  (y.o.y). Beberapa faktor yang diperkirakan menyebabkan capaian inflasi tersebut diantaranya kondisi musim yang

**Grafik 6.2**  
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Proyeksi 2010



memasuki musim hujan, peningkatan permintaan seiring persiapan event *Sail* Banda 2010 serta kondisi pada triwulan II 2009 yang terjadi deflasi sebesar  $0,21\%$ (y.o.y). Adanya kenaikan harga eceran tertinggi pupuk per tanggal 1 April 2010 diperkirakan akan mendorong peningkatan biaya produksi sehingga harga komoditas akan menyesuaikan. Rencana

kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai bulan Juli 2010 diperkirakan juga akan mendorong ekspektasi masyarakat akan kenaikan harga barang-barang lain secara umum. Kenaikan Upah Minimum Provinsi Maluku sebesar  $8,04\%$  untuk tahun 2010 juga diperkirakan mendorong kenaikan harga.

Kinerja perbankan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan baik dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Peningkatan ini diperkirakan sejalan dengan komitmen perbankan di Maluku untuk mempromosikan dan menjual produk TabunganKu guna menjaring dana-dana dari kalangan potensial namun selama ini terkendala persyaratan administrasi. Dari sisi penyaluran kredit peningkatan didorong oleh relaksasi ketentuan KUR, penambahan perbankan penyalur KUR, pelonggaran ketentuan dan syarat administrasi (nasabah lama boleh mendapatkan kredit kembali), penurunan suku bunga akan meningkatkan determinasi perbankan dalam menyalurkan kredit.

Pembukaan jaringan kantor baru perbankan daerah dan rencana pembukaan kantor cabang baru beberapa bank swasta nasional mengindikasikan prospek perkembangan Maluku di mata para pelaku ekonomi masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan lebih lanjut. Hal ini terutama didukung masih berkembangnya daerah-daerah baru hasil pemekaran yang terus melakukan akselerasi pembangunan guna mengejar ketertinggalan



.....  
baik sarana maupun pra-sarana daerahnya dibandingkan daerah-daerah lain yang lain yang lebih maju.



*halaman ini sengaja dikosongkan*



# ***LAMPIRAN-LAMPIRAN***

INDIKATOR POKOK PERBANKAN  
PROPINSI MALUKU

Dalam Milyar Rupiah

Keterangan	2008	2009				2010		Pangsa (%)	Nominal			(% )		
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I (Mar)	TRW I		q-t-q	y-t-d	y-o-y	q-t-q	y-t-d	y-o-y
<b>JUMLAH BANK</b>	14	15	15	15	15	15	15	100.00	-	-	-	-	-	-
Bank Pemerintah/Pemda	5	5	5	5	5	5	5	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bank Swasta	7	8	8	8	8	8	8	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BPR	2	2	2	2	2	2	2	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>JUMLAH KANTOR</b>	86	89	89	99	99	102			3.00	3.00	13.00	3.03	3.03	14.61
(Termasuk BRI Unit)														
<b>ASET PERBANKAN</b>														
<b>PER JENIS BANK</b>	6,047.6	6,068.6	6,054.7	6,265.8	6,364.6	6,991.8	100.00	627.20	627.20	923.20	9.85	9.85	15.21	
Bank Pemerintah/Pemda	4,488.2	4,560.8	4,452.9	4,564.3	4,534.5	5,144.4	73.58	609.96	609.96	583.64	13.45	13.45	12.80	
Bank Swasta	1,295.5	1,262.7	1,331.8	1,434.8	1,552.7	1,548.5	22.15	(4.20)	(4.20)	285.77	(0.27)	(0.27)	22.63	
BPR	263.8	245.1	270.1	266.8	277.4	298.8	4.27	21.44	15.41	53.79	7.73	7.73	21.95	
<b>PER WILAYAH</b>	6,047.6	6,068.6	6,054.7	6,265.8	6,364.6	6,991.8	100.00	627.20	627.20	923.20	9.85	9.85	15.21	
Ambon	4,340.9	4,275.8	4,208.7	4,440.0	4,681.9	5,156.5	73.75	474.56	474.56	880.68	10.14	10.14	20.60	
Maluku Tengah	784.4	814.5	833.6	803.8	734.9	822.6	11.77	87.73	87.73	8.13	11.94	11.94	1.00	
Maluku Tenggara	922.4	978.2	1,012.5	1,022.0	947.7	1,012.6	14.48	64.90	64.90	34.39	6.85	6.85	3.52	
<b>DANA PIHAK KE-3 (SIMPANAN) YANG DIHIMPUN</b>														
<b>PER JENIS BANK</b>	4,770.1	4,887.4	4,990.1	5,137.8	5,200.4	5,257.620	100.00	57.22	57.22	370.21	1.10	1.10	7.57	
Bank Pemerintah/Pemda	3,448.4	3,606.6	3,657.8	3,757.1	3,728.6	3,803.3	72.34	74.71	74.71	196.66	2.00	2.00	5.45	
Bank Swasta	1,222.3	1,191.9	1,220.3	1,286.6	1,372.5	1,339.6	25.48	(32.91)	(32.91)	147.65	(2.40)	(2.40)	12.39	
BPR	99.4	88.8	112.0	94.0	99.3	114.7	2.18	15.41	15.41	25.89	15.52	15.52	29.15	
<b>PER WILAYAH</b>	4,770.1	4,887.4	4,990.1	5,137.8	5,200.4	5,257.620	100.00	57.22	57.22	370.21	1.10	1.10	7.57	
Ambon	3,276.7	3,233.5	3,353.6	3,563.7	3,807.5	3,697.1	70.32	(110.39)	(110.39)	463.61	(2.90)	(2.90)	14.34	
Maluku Tengah	657.4	725.1	685.8	629.1	541.6	617.0	11.74	75.41	75.41	(108.09)	13.92	13.92	(14.91)	
Maluku Tenggara	836.0	928.8	950.6	945.0	851.3	943.5	17.95	92.20	92.20	14.68	10.83	10.83	1.58	
<b>PER JENIS SIMPANAN</b>	4,770.1	4,887.4	4,990.1	5,137.8	5,200.4	5,257.620	100.00	57.22	57.22	370.21	1.10	1.10	7.57	
Giro	1,099.9	1,374.5	1,266.4	1,192.4	968.6	1,165.4	22.17	196.85	196.85	(209.10)	20.32	20.32	(15.21)	
Tabungan	2,406.5	2,018.1	2,170.7	2,260.9	2,737.0	2,332.4	44.36	(404.64)	(404.64)	314.31	(14.78)	(14.78)	15.58	
Deposito	1,263.7	1,494.8	1,553.0	1,684.5	1,494.8	1,759.8	33.47	265.01	265.01	265.00	17.73	17.73	17.73	
<b>PER DEPOSAN</b>	4,770.1	4,887.4	4,990.1	5,137.8	5,200.4	5,257.620	100.00	57.22	57.22	370.21	1.10	1.10	7.57	
Pemerintah Pusat	59.9	85.7	109.4	106.2	69.5	74.7	1.42	5.22	5.22	(10.99)	7.51	7.51	(12.82)	
Pemerintah Daerah	552.2	1,079.1	1,019.0	976.7	336.0	962.6	18.31	626.60	626.60	(116.53)	186.50	186.50	(10.80)	
Bdn/Lbg Pemerintah	58.3	51.1	44.4	43.6	58.2	34.5	0.66	(23.74)	(23.74)	(16.59)	(40.77)	(40.77)	(32.49)	
BUMN	60.7	36.4	22.0	55.0	248.7	196.1	3.73	(52.54)	(52.54)	159.68	(21.13)	(21.13)	438.26	
BUMD	1.0	1.6	2.0	0.9	3.3	4.3	0.08	1.03	1.03	2.78	31.01	31.01	177.23	
Perusahaan Asuransi	0.5	0.6	0.8	0.6	0.3	0.5	0.01	0.21	0.21	(0.08)	66.24	66.24	(13.11)	
Perusahaan Swasta	205.6	120.4	102.7	136.1	277.4	192.2	3.66	(85.27)	(85.27)	71.75	(30.73)	(30.73)	59.58	
Yysn & Bdn Sosial	55.3	49.3	48.0	49.1	51.0	39.5	0.75	(11.47)	(11.47)	(9.78)	(22.49)	(22.49)	(19.83)	
Koperasi	6.0	5.6	5.4	5.5	7.0	6.5	0.12	(0.54)	(0.54)	0.84	(7.66)	(7.66)	14.86	
Perorangan	3,686.8	3,398.6	3,586.5	3,708.9	4,094.8	3,729.6	70.94	(365.15)	(365.15)	331.05	(8.92)	(8.92)	9.74	
Lainnya	83.9	59.0	49.8	55.2	54.2	17.1	0.32	(37.13)	(37.13)	(41.92)	(68.52)	(68.52)	(71.07)	
<b>KREDIT YG DISALURKAN</b>														
<b>PER JENIS BANK</b>	2,337.4	2,496.9	2,753.7	2,988.3	3,149.1	3,327.8	100.00	178.71	178.71	830.89	5.67	5.67	33.28	
Bank Pemerintah/Pemda	1,846.2	1,974.0	2,196.5	2,364.9	2,478.2	2,607.7	78.36	129.53	129.53	633.71	5.23	5.23	32.10	
Bank Swasta	324.7	350.4	392.6	460.1	504.1	542.8	16.31	38.67	38.67	192.42	7.67	7.67	54.92	
BPR	166.4	172.5	164.6	163.3	166.8	177.3	5.33	10.50	10.50	4.75	6.30	6.30	2.76	
<b>PER WILAYAH</b>	2,337.4	2,496.9	2,753.7	2,988.3	3,149.1	3,327.8	100.00	178.71	178.71	830.89	5.67	5.67	33.28	
Ambon	1,464.8	1,547.1	1,689.2	1,816.8	1,932.1	2,042.6	61.38	110.55	110.55	495.56	5.72	5.72	32.03	
Maluku Tengah	418.4	459.6	515.8	567.4	579.3	614.7	18.47	35.39	35.39	155.03	6.11	6.11	33.73	
Maluku Tenggara	454.2	490.2	548.7	604.1	637.7	670.5	20.15	32.76	32.76	180.31	5.14	5.14	36.78	
<b>PER JNS PENGGUNAAN</b>	2,337.4	2,496.9	2,753.7	2,988.3	3,149.1	3,327.8	100.00	178.71	178.71	830.89	5.67	5.67	33.28	
Modal Kerja	625.6	683.7	775.8	839.4	833.3	785.8	23.61	(47.45)	(47.45)	102.13	(5.69)	(5.69)	14.94	
Investasi	134.3	145.9	170.4	192.7	222.9	252.2	7.58	29.30	29.30	106.38	13.14	13.14	72.93	
Konsumsi	1,577.5	1,667.4	1,807.5	1,956.2	2,092.9	2,289.7	68.81	196.86	196.86	622.38	9.41	9.41	37.33	
<b>PER SEKTOR</b>	2,337.4	2,496.9	2,753.7	2,988.3	3,149.1	3,327.8	100.00	178.71	178.71	830.89	5.67	5.67	33.28	
Pertanian	26.9	37.5	36.1	49.3	45.8	33.1	0.99	(12.71)	(12.71)	(4.43)	(27.75)	(27.75)	(11.80)	
Pertambangan	-	-	-	-	-	2.0	0.06	2.01	2.01	2.01				
Industri	9.5	9.0	9.5	7.8	7.4	17.9	0.54	10.50	10.50	8.91	141.09	141.09	98.62	
Listrik, Gas & Air	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.9	0.15	4.77	4.77	4.76				
Konstruksi	185.1	202.2	237.9	252.6	181.4	179.2	5.38	(2.19)	(2.19)	(23.05)	(1.21)	(1.21)	(11.40)	
Perdagangan	482.7	508.8	589.9	653.4	695.5	555.9	16.71	(139.53)	(139.53)	47.14	(20.06)	(20.06)	9.26	
Angkutan	12.7	16.6	25.1	21.8	23.3	21.2	0.64	(2.08)	(2.08)	4.54	(8.92)	(8.92)	27.28	
Jasa Dunia Usaha	31.0	29.5	29.2	30.5	53.6	48.8	1.47	(4.84)	(4.84)	19.32	(9.02)	(9.02)	65.59	
Jasa Sosial	3.0	3.7	4.9	4.5	34.6	60.3	1.81	25.68	25.68	56.61	74.10	74.10	1,525.52	
Lainnya	1,586.3	1,689.3	1,820.9	1,968.3	2,107.3	2,404.4	72.25	297.10	297.10	715.07	14.10	14.10	42.33	
<b>PER SKALA USAHA</b>	2,337.0	2,496.9	2,753.7	2,946.8	3,149.1	3,327.8	100.00	178.71	178.71	830.89	5.67	5.67	33.28	
Mikro (Plafond <50 Jt)	1,253.1	1,379.3	1,413.2	1,545.0	1,571.3	1,165.0	35.01	(406.25)	(406.25)	(214.26)	(25.86)	(25.86)	(15.53)	
Kecil (Plafond 50 Jt - 500 Jt)	598.2	614.8	761.3	795.2	943.2	1,275.0	38.31	331.82	331.82	660.19	35.18	35.18	107.38	
Menengah (Plafond 500 Jt - 5 M)	404.3	405.6	482.0	511.5	503.4	505.4	15.19	2.07	2.07	99.88	0.41	0.41	24.63	
Non UMKM (Plafond > 5M)	81.4	97.3	97.2	95.1	131.3	382.4	11.49	251.07	251.07	285.08	191.23	191.23	293.03	
<b>L D R (%)</b>	49.00%	51.09%	55.18%	58.16%	60.55%	63.29%								
<b>NPL's</b>														
Nominal	47.94	60.46	65.36	80.20	60.33	75.97		15.65	15.65	15.51	25.94	25.94	25.66	
Persen	2.05%	2.42%	2.37%	2.68%	1.92%	2.28%								
<b>K U R (Kredit Usaha Rakyat)*</b>														
Plafond (Rp miliar)		83.65	96.68	106.46	113.70	126.91								
Debitur (org)		6,499	7,706	7,997	7,944	10,169		13.21	13.21	43.27	11.62	11.62	51.72	
NPL's KUR		2.49%	3.99%	3.76%	3.42%	2.78%		2.225	2.225	3.670	28.01	28.01	56.47	



Tabel Abstraksi PEKDA TW I 2010 Provinsi Maluku

## a. Inflasi dan PDRB

Indikator	2008	2009				2010
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
MAKRO						
Indeks Harga Konsumen	110.70	113.20	110.45	112.46	117.87	121.22
Laju Inflasi Tahunan	9.34	8.84	-0.21	-3.29	6.48	7.08
PDRB-harga Konstan (miliar)**	3,787.10	956.83	964.85	1,001.28	1,028,140.51	1,016,386.48
- Pertanian	120,985.05	306,291.00	306,576.79	313,725.95	325,546.00	327,407.00
- Pertambangan & Penggalian	2,700.42	6,603.71	6,757.49	7,071.15	7,036.80	7,121.31
- Industri Pengolahan	18,844.48	50,200.96	50,158.74	50,314.30	50,907.70	51,016.90
- Listrik, gas dan Air Bersih	2,095.80	5,254.44	4,322.83	4,546.88	4,625.61	3,990.77
- Bangunan	4,984.77	13,163.29	12,585.46	13,424.24	13,618.80	13,345.00
- Perdagangan, hotel dan restaurant	97,153.39	237,189.84	249,411.08	259,036.78	267,843.00	260,079.00
- Pengangkutan dan Komunikasi	40,769.00	104,029.65	105,926.21	110,072.93	113,310.00	111,653.00
- keuangan, persewaan da jasa	20,964.50	52,899.08	53,584.60	54,901.96	55,875.60	55,160.50
- Jasa	70,212.99	181,194.82	175,528.32	188,190.18	189,377.00	186,613.00
Pertumbuhan PDRB (yoy%)*	4.23%	3.83%	4.85%	5.25%	5.12%	5.34%
Nilai ekspor non migas (USD juta)	26,520	28,340	7,085	8,672	11,114	13,595
Volume Expor Nonmigas (ribu ton)	467,286	363,266	9,750	7,275	10,779	10,779
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	1,476	9,307	120	2,365	1,721	1,721
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	1,366	3,175	80	2,888	1,815	1,815

## b. Perbankan

Indikator	2008	2009				2010
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Perbankan*)						
Total Aset (Rp Miliar)	6047.61	6068.56	6054.72	6265.85	6364.56	6991.76
DPK (RpMiliar)	4770.12	4887.41	4990.09	5137.75	5200.40	5257.62
- Giro (Rp Miliar)	1099.87	1374.53	1266.37	1192.38	968.58	1165.43
- Tabungan (Rp Miliar)	2406.52	2018.05	2170.71	2260.87	2737.01	2332.37
- Deposito (Rp Miliar)	1263.73	1494.83	1553.01	1684.50	1494.82	1759.83
Kredit (Rp Miliar) berdasarkan lokasi proyek	2337.35	2496.91	2753.70	2988.31	3149.09	3327.80
- Modal Kerja	625.59	681.95	770.54	839.39	833.26	880.55
- Investasi	134.29	147.59	175.69	192.71	222.95	235.60
- Konsumsi	1577.47	1667.37	1807.46	1956.20	2092.89	2211.66
- LDR	49.00%	51.09%	55.18%	58.16%	60.55%	63.29%
Kredit (Rp Miliar) berdasarkan lokasi kantor cabang	2337.35	2496.91	2753.70	2988.31	3149.09	3327.80
- Modal Kerja	619.90	490.17	548.66	604.06	637.71	673.90
- Investasi	139.98	459.65	515.81	567.41	579.28	612.16
- Konsumsi	1577.47	1547.09	1689.23	1816.83	1932.10	2041.74
Kredit UMKM (Rp Miliar)						
Kredit Mikro (<Rp50juta) (Miliar Rp)	1,250,483	1,331,784	1,424,497	1,913,820	1,568,463	1,164,998
- Kredit Modal Kerja	60,794	67,464	85,944	134,408	102,289	75,976
- Kredit Investasi	12,176	13,288	16,696	26,032	25,247	18,753
- Kredit Konsumsi	1,177,513	1,251,032	1,321,857	1,753,379	1,440,927	1,070,269
Kredit Kecil (Rp50juta<X<Rp500juta) (Miliar Rp)	623,794	604,257	671,424	898,800	878,781	1,274,987
- Kredit Modal Kerja	235,531	197,705	219,876	289,585	258,178	374,580
- Kredit Investasi	34,915	37,107	56,509	71,125	68,184	98,925
- Kredit Konsumsi	353,348	369,444	395,039	538,090	552,419	801,482
Kredit Menengah (Rp500juta<X<Rp5milyar) (Miliar Rp)	440,934	382,429	459,591	580,396	569,664	505,448
- Kredit Modal Kerja	326,999	297,010	344,504	429,397	427,769	379,548
- Kredit Investasi	52,085	37,107	58,232	84,078	85,345	75,724
- Kredit Konsumsi	61,850	48,312	56,855	66,921	56,550	50,175
Total Kredit MKM (Miliar Rp)	2,315,211	2,318,470	2,555,512	3,393,016	3,016,908	3,327,608
NPL MKM Gross (%)						
NPL MKM nett (%)						
<b>BPR</b>						
Total Aset (Rp Miliar)	263,828	245,055	270,062	266,811	277,406	298,846
DPK (RpTriliun)	99,414	88,834	112,026	94,018	99,316	114,727
- Tabungan (Rp Miliar)	18,840	17,328	27,251	20,720	20,661	21,351
- Deposito (Rp Miliar)	80,573	71,506	84,774	73,298	78,655	93,377
- Giro (Rp Miliar)						
Kredit (Rp Miliar) berdasarkan lokasi proyek	166,383	172,514	164,598	163,270	166,765	177,269
- Modal Kerja	5,846	5,906	283	943	2,112	1,778
- Investasi	1,048	1,002	4,857	2,560	2,228	1,587
- Konsumsi	159,489	165,606	159,457	159,767	162,425	173,903
- LDR	167	194	147	174	168	155
Kredit UMKM (Miliar Rp)	2,315,211	2,318,470	2,555,512	3,393,016	3,016,908	3,327,608
Ratio NPL Gross (%)						
Rasio NPL nett (%)	0.54	1.01	0.84	1.77	1.23	2.33
LDR						

Ket:

\*) Prakiraan Bank Indonesia



## Data Sistem Pembayaran Kantor Bank Indonesia Ambon

(Dalam Juta Rp)

Transaksi	2008	2009				2010
		TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV	TRW I
Jumlah Hari Transaksi	245	62	63	62	63	58
Inflow (kumulatif)	708,752	426,968	17,780	77,148	99,596	294,447
Outflow (kumulatif)	1,532,563	29,973	324,151	169,515	384,345	24,272
Persediaan Kas (Posisi)	1,401,001	628,722	391,123	581,442	425,790	286,322
PTTB (kumulatif)	257,167	22,877	15,577	7,900	25,564	145,040
Nominal Transaksi RTGS	30,105,773	3,488,140	5,118,930	2,473,650	6,997,320	4,075,440
Volume Transaksi RTGS	19,928.10	3,086.90	4,287.87	3,842.00	7,197.44	5,716.00
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS	122,881	56,260	81,253	39,898	111,069	70,266
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS	81	50	68	62	114	99
Nominal Kliring Kredit	539,512.92	131,150	145,467	152,637	149,788	176,807
Volume Kliring Kredit	74,592.00	17,429	19,327	20,475	18,164	21,104
Rata-rata Harian Nominal Kliring Kredit	2,202	2,115	2,309	2,462	2,378	3,048
Rata-rata Harian Volume Kliring Kredit	304	281	307	330	288	364
Nominal Kliring Debet	2,067,883.61	482,005	509,518	584,233	732,755	621,497
Volume Kliring Debet	47,190.00	11,776	12,380	12,815	13,403	12,887
Rata-rata Harian Nominal Kliring Debet	8,440	7,774	8,088	9,423	11,631	10,715
Rata-rata Harian Volume Kliring Debet	193	190	197	207	213	222
Nominal Kliring Pengembalian	36,700.14	4,916	10,770	11,562	11,471	5,310
Volume Kliring Pengembalian	499.00	109	159	234	204	162
Rata-rata Harian Nominal Kliring Pengembalian	149.80	79.29	170.96	186.48	182.08	91.55
Rata-rata Harian Volume Kliring Pengembalian	2.04	1.76	2.52	3.77	3.24	2.79
Nominal Tolak Cek/BG Kosong	23,532.90	4,422.93	8,194.85	11,191.83	5,980.72	4,143.67
Volume Tolak Cek/BG Kosong	350.00	89.00	140.00	239.00	183.00	135.00
Rata-rata Harian Nominal Cek/BG Kosong	96.05	71.34	130.08	180.51	94.93	71.44
Rata-rata Harian Volume Cek/BG Kosong	0.39	1.15	2.06	2.91	1.51	1.23